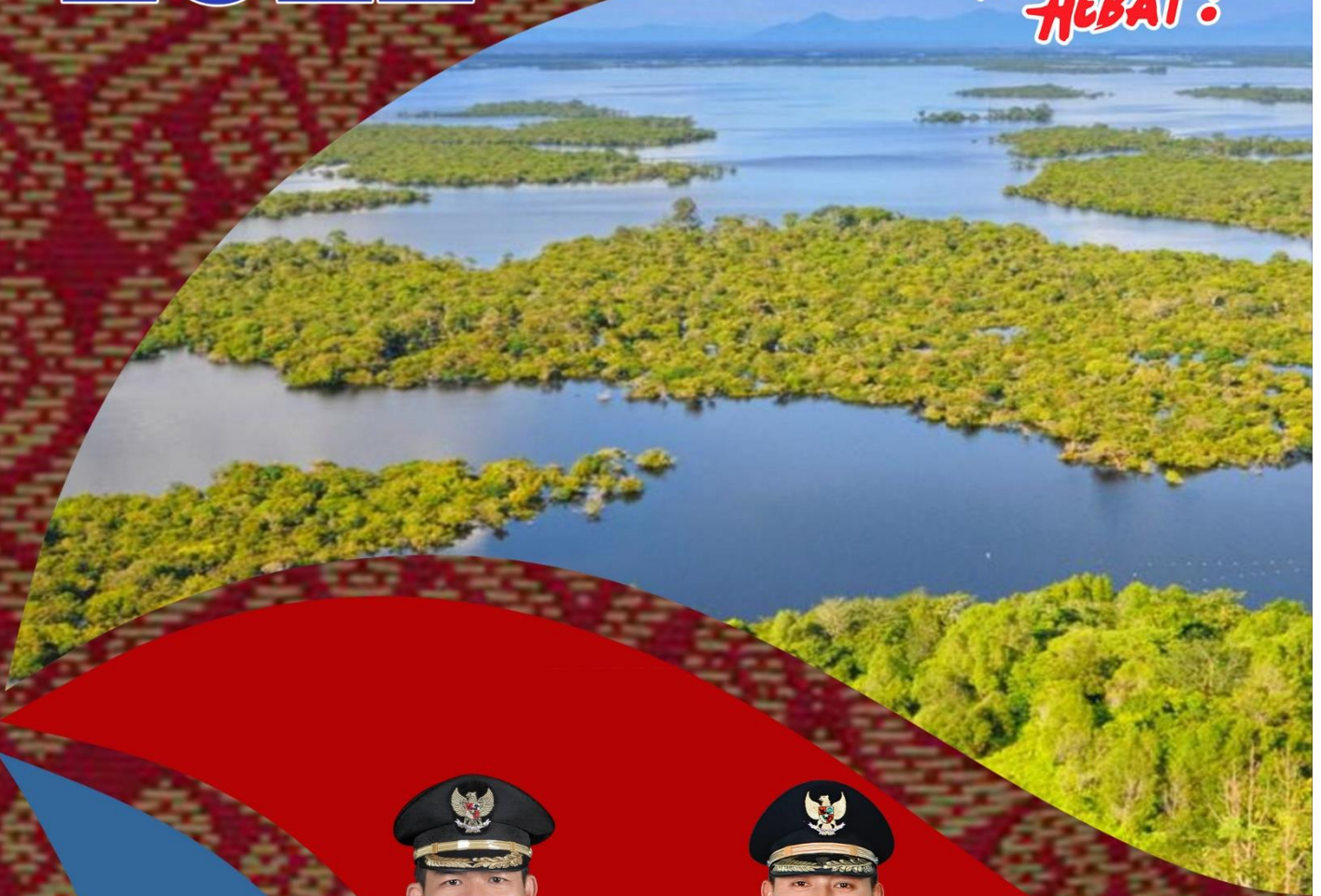


**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022**



**LPPD
2022**

**KAPUAS HULU
HEBAT!**



FRANSISKUS DIAAN, S.H

BUPATI KAPUAS HULU



WAHYUDI HIDAYAT, S.T.

WAKIL BUPATI KAPUAS HULU



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas berkat dan kasih-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan LPPD ini merupakan pelaksanaan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai laporan hasil implementasi asas ekonomi daerah serta pelaksanaan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

LPPD ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penguji. Capaian kinerja tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).

Pada Kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya dan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan bagi Pemerintah Daerah.

Putussibau, 25 Maret 2023


BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN, S.H



D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	4
c. Jumlah Penduduk	8
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	12
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	13
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	21
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	24
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	24
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	41
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD)	50
d. Kegiatan Pembangunan Berdasarkan RKPD	56
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	69
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	73
2.1. Capaian Kinerja Makro	73
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	73
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	108
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	117
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	119
2.3.1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja	108



2.3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	122
2.3.3.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	124
2.3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	127
2.3.5.	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Sasaran Strategis	129
2.3.6.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif /Solusi Yang Telah Dilakukan	136
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	151
BAB IV	PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1.	Urusan Pendidikan	152
4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar	152
4.1.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	152
4.1.3.	Realisasi Capaian SPM	153
4.1.4.	Alokasi Anggaran	154
4.1.5.	Dukungan Personil	158
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	159
4.2.	Urusan Kesehatan	160
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	160
4.2.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	161
4.2.3.	Realisasi Capaian SPM	162
4.2.4.	Alokasi Anggaran	167
4.2.5.	Dukungan Personil	173
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	174
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	176
4.3.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	177
4.3.3.	Realisasi Capaian SPM	177



4.3.4.	Alokasi Anggaran	178
4.3.5.	Dukungan Personil	182
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	183
		184
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	184
4.4.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	184
4.4.3.	Realisasi Capaian SPM	185
4.4.4.	Alokasi Anggaran	186
4.4.5.	Dukungan Personil	187
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	188
4.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	188
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	188
4.5.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	189
4.5.3.	Realisasi Capaian SPM	190
4.5.4.	Alokasi Anggaran	192
4.5.5.	Dukungan Personil	195
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	196
4.6.	Urusan Sosial	
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	198
4.6.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	198
4.6.3.	Realisasi Capaian SPM	199
4.6.4.	Alokasi Anggaran	201
4.6.5.	Dukungan Personil	203
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	203
BAB V	PENUTUP	205
	LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintahan administrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan di Putussibau dibentuk pada tanggal 7 Januari 1953 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan, yang pada tanggal 4 Juli 1959 ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820). Sejalan dengan semangat otonomi daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka nomenklatur Daerah Tingkat II Kapuas Hulu berubah menjadi Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya



saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD (RLPPD).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah, dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



- k. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b. Data Geografis Wilayah

b.1. Batas Administrasi Daerah

Kedudukan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Jarak dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Pontianak (ibukota Propinsi Kalimantan Barat) adalah ± 657 km melalui jalan darat dan ± 842 km melalui jalur sungai Kapuas serta ± 1 jam 15 menit penerbangan.

b.2. Luas Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah 31.318,246 km² berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022 atau mencakup 21,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas, setelah



Kabupaten Ketapang dan secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, dan 278 Desa.

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas $\pm 3.900 \text{ km}^2$ merupakan daerah perairan atau tergenang (12.45 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas $\pm 10.642,236 \text{ km}^2$ merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara $16.776,01 \text{ km}^2$ atau $\pm 53,57 \%$ merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Taman Nasional Betung Kerihun | : 8.000 km^2 |
| 2. Taman Nasional Danau Sentarum | : 1.320 km^2 |
| 3. Hutan Lindung | : $6.289,73 \text{ km}^2$ |
| 4. Daerah Resapan Air | : $495,46 \text{ km}^2$ |
| 5. Lahan Gambut | : $670,82 \text{ km}^2$ |

b.3. Topograsi dan Iklim

1) Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah Sungai Kapuas. Di Kabupaten Kapuas Hulu sungai masih memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari Putussibau ke kota-kota lain yang berada di jalur sungai kapuas dan ke Kecamatan. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai ini.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman, dengan ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan



lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk kualii yang terdiri dari daratan rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bervariasi dari dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0-2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang bagian Utara. mempunyai kemiringan 2-15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15-40%



2) Iklim

a. Curah Hujan

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Di Kabupaten Kapuas Hulu curah hujan cukup tinggi dalam satu tahun berkisar antara 3300 mm sampai 5000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240 - 260 per tahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar antara 29 – 124 mm/hari.

b. Musim

Terdapat 2 (dua) musim di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.

c. Suhu dan Kelembaban

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Maksimum curah hujan ganda dan dengan suhu rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22°C. Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu suhu minimum rata-rata per tahun adalah 21,5°C hingga 23,2°C dan suhu maksimum rata-rata per tahun adalah 32,3°C sampai 34,7°C. Tingginya suhu udara di Kapuas Hulu disebabkan antara lain karena letak Kabupaten Kapuas Hulu yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan struktur geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang secara umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.



d. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat, dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang ± 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembaban dan Danau Oxbow di daerah-daerah meander sungai. Danau-danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau.

c. Jumlah Penduduk

c.1. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 266.651 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 136.680 jiwa (51,26%) dan penduduk perempuan sebanyak 129.971 jiwa (48,74%).

Dengan luas wilayah yang mencapai 31.318,246 km², Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 8,51 jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu relatif kecil dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Secara umum, penyebaran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tidak merata dan membentuk pola linear sesuai jalur Sungai Kapuas dan jalur jalan. Pengelompokan penduduk terutama terdapat pada kecamatan-kecamatan yang memiliki akses tinggi ke jalur pelayaran Sungai Kapuas dan jalur jalan darat.



c.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur kependudukan berdasarkan jenis kelamin selain untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan juga digunakan untuk mengetahui rasio jenis kelamin suatu wilayah yang digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Pada tahun 2022 komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel. 1.1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Putusibau Utara	14.277	13.830	28.107
2.	Bika	2.541	2.396	4.937
3.	Embaloh Hilir	3.117	2.968	6.085
4.	Embaloh Hulu	2.780	2.637	5.417
5.	Bunut Hilir	4.535	4.390	8.925
6.	Bunut Hulu	7.957	7.588	15.545
7.	Jongkong	5.770	5.661	11.431
8.	Hulu Gurung	7.295	7.007	14.302
9.	Selimbau	7.249	6.987	14.236
10.	Semitau	5.164	4.746	9.910
11.	Seberuang	6.104	5.666	11.770
12.	Batang Lupar	2.811	2.764	5.575
13.	Empanang	1.993	1.839	3.832
14.	Badau	3.662	3.540	7.202
15.	Silat Hilir	10.924	10.149	21.073
16.	Silat Hulu	6.251	5.766	12.017
17.	Putusibau Selatan	12.805	12.368	25.173
16.	Kalis	7.377	6.936	14.313
19.	Boyan Tanjung	6.987	6.555	13.542
20.	Mentebah	5.853	5.433	11.286
21.	Pengkadan	4.953	4.744	9.697



NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
22.	Suhaid	5.045	4.872	9.917
23.	Puring Kencana	1.230	1.129	2.359
	JUMLAH	136.680	129.971	266.651

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2022.

Dari Tabel 1.1. diatas dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 105,17 %. Angka tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.75%.

c.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Struktur penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan usia penduduk merupakan hal penting dikarenakan dengan mengetahui struktur usia penduduk maka dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang menjadi indikator keadaan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi angka rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Jika dilihat dari komposisi usia, pada tahun 2022 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 186.237 jiwa atau 69,83 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (usia <15 tahun ditambah dengan usia >65 tahun) sebanyak 80.414 jiwa atau 25.63 persen, sehingga angka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 adalah sebesar 43,18 hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 43 orang penduduk usia non produktif. Lebih lanjut jumlah penduduk berdasarkan komposisi usia disampaikan sebagai berikut:



Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0 - 4 Tahun	18.669	7.00%
2.	5 - 9 Tahun	23.834	8.94%
3.	10 - 14 Tahun	25.175	9.44%
4.	15 - 19 Tahun	21.730	8.15%
5.	20 - 24 Tahun	23.892	8.96%
6.	25 - 29 Tahun	21.058	7.90%
7.	30 – 34 Tahun	20.778	7.79%
8.	35 – 39 Tahun	21.927	8.22%
9.	40 – 44 Tahun	21.896	8.21%
10.	45 – 49 Tahun	18.385	6.89%
11.	50 – 54 Tahun	15.922	5.97%
12.	55 – 59 Tahun	11.579	4.34%
13.	60 – 64 Tahun	9.070	3.40%
14.	65 – 69 Tahun	5.649	2.12%
15.	70 – 74 Tahun	3.546	1.33%
16.	> 75 Tahun	3.541	1.33%
	Jumlah	266.651	100,00%

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2022.

c.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan diperlukan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan jenis pendidikan yang mendominasi suatu wilayah. Apabila dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dari tingkat pendidikan masyarakat, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah tamat Sekolah Dasar/ sederajat yaitu sebesar 26.449% atau sejumlah 70.661 jiwa, lebih lanjut disampaikan jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Tidak/Belum Sekolah	56.599	21.226%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	40.740	15.278%
3.	Tamat SD/Sederajat	70.661	26.449%
4.	SLTP/Sederajat	39.194	14.669%
5.	SLTA/Sederajat	45.078	16.905%
6.	Diploma I/II	1.536	0.576%
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	3.672	1.377%
8.	Diploma IV/Strata 1	8.895	3.336%
9.	Strata 2	271	0.102%
10.	Strata 3	5	0.002%
	Jumlah	266.651	100,00

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2022.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan, 278 desa dan 4 kelurahan seperti pada tabel 1.4

Tabel 1.4.
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan

No. Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Putussibau Utara	17	2
2.	Putussibau Selatan	14	2
3.	Silat Hilir	13	-
4.	Silat Hulu	14	-
5.	Hulu Gurung	15	-
6.	Bunut Hulu	15	-
7.	Mentebah	8	-
8.	Bika	8	-



No. Urut	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
9.	Kalis	17	-
10.	Embaloh Hilir	9	-
11.	Bunut Hilir	11	-
12.	Boyan Tanjung	16	-
13.	Pengkadan	11	-
14.	Jongkong	14	-
15.	Selimbau	17	-
16.	Suhaid	11	-
17.	Seberuang	15	-
18.	Semitau	12	-
19.	Empanang	6	-
20.	Puring Kencana	6	-
21.	Badau	9	-
22.	Batang Lupa	10	-
23.	Embaloh Hulu	10	-
	Jumlah	78	4

Sumber : Kapuas Hulu Dalam Angka 2023 (BPS Kapuas Hulu)

e. Jumlah Perangkat Daerah , Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang profesional untuk masyarakat yang sejahtera, maju, cerdas, sehat, produktif melalui akselerasi pembangunan partisipatif berbasiskan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan



dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fransiskus Diaan, S.H. dan Wahyudi Hidayat, S.T., merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih sebagai hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2/PL.02.7-Kpt/6106/KPU-Kab/1/2021 tanggal 22 Januari tahun 2021 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah. Berikut disampaikan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu menurut urusan yang dilaksanakan dan dasar hukum.



Tabel 1.5

**Nomenklatur Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu**

No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021	- Pendidikan - Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021	- Kesehatan - Pengendalian Penduduk dan KB
3	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021	- Lingkungan Hidup - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021	- Sosial - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021	- Perindustrian - Tenaga Kerja - Transmigrasi
10	Dinas Pertanian dan Pangan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021	- Pertanian - Pangan
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021	Perhubungan
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021	- Komunikasi dan Informasi - Statistik - Persandian
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021	- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021	Penanaman Modal
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021	- Kepemudaan dan Olahraga - Pariwisata
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021	- Perpustakaan - Kearsipan
19	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021	Kelautan dan Perikanan
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021	Perencanaan, penelitian dan pengembangan
21	Badan Keuangan dan Asset Daerah	Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
23	Inspektorat	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021	Pengawasan dan Perencanaan Keuangan
24	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021	- Administrasi Pemerintahan
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021	Administrasi Pemerintahan
26	Badan Pengelola Perbatasan	Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 .	Administrasi Pemerintahan



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021	Administrasi Pemerintahan Umum
28	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
29	Kecamatan	Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan
30	Kelurahan	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah membentuk Unit Perangkat Daerah (Unit Pelaksana Teknis/UPT) berjumlah 542 unit kerja, adapun Nomenklatur UPT sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.6
Nomenklatur Unit Perangkat Daerah
(Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) di Lingkungan
Pemerintah Kapuas Hulu

No.	Unit Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Keterangan
1	UPT. Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017	1 unit kerja
2	UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022	1 unit kerja
3	UPT. Pembenihan, Pembibitan Kesehatan Hewan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017	1 unit kerja
4	UPT. Benih Ikan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017	1 unit kerja
5	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022	1 unit kerja



No.	Unit Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Keterangan
6	UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022	23 unit kerja (di 23 Kecamatan)
7	UPT. Satuan Pendidikan	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019	- Pendidikan Usia Dini sebanyak 22 unit kerja - Pendidikan Dasar sebanyak 490 unit kerja
8	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Semitau	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022	1 unit kerja
10	UPT. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Publik	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017	1 unit kerja

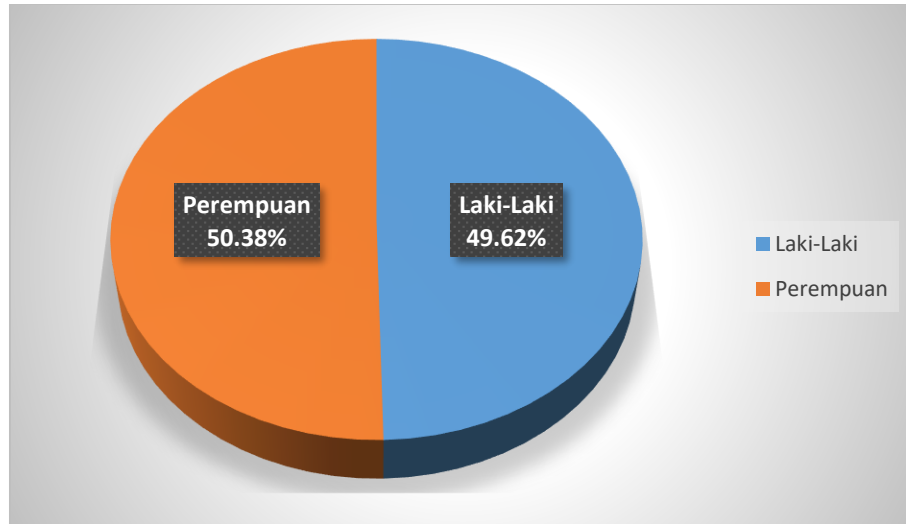
Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, Perangkat Daerah didukung oleh sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan yang melekat pada urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan Penunjang. Berikut disampaikan gambaran umum keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data per 31 Desember 2022, yang merupakan deskripsi PNS dari kategori Jenis Kelamin, Golongan Ruang Kepangkatan dan Pendidikan Formal.

a) PNS Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 4611 orang yang terdiri dari 2.288 orang laki-laki dan 2.323 orang perempuan. Gambar berikut menunjukkan bahwa prosentase jumlah PNS laki-laki lebih besar (49.62%) dari prosentase jumlah PNS perempuan (50.38%).

Gambar 1.1.
PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



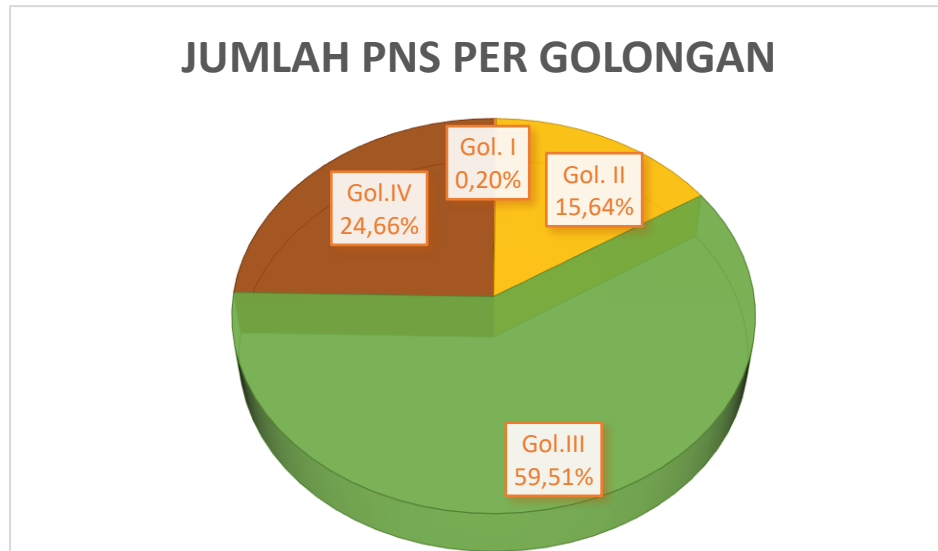
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu.

b) PNS Menurut Golongan Ruang Kepangkatan

Pada Tahun 2022 PNS dengan Golongan III merupakan kelompok terbesar yaitu sebanyak 2.744 orang atau sebesar 59.51% dari jumlah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian secara berturut-turut adalah Golongan III sebanyak 2744 orang (59.51%) Golongan IV sebanyak 1137 orang (24.66%) Golongan II sebanyak 721 orang (15.64%), dan Golongan I sebanyak 9 orang (0,20%). Distribusi Golongan Ruang Kepangkatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.2.
PNS Berdasarkan Golongan Ruang



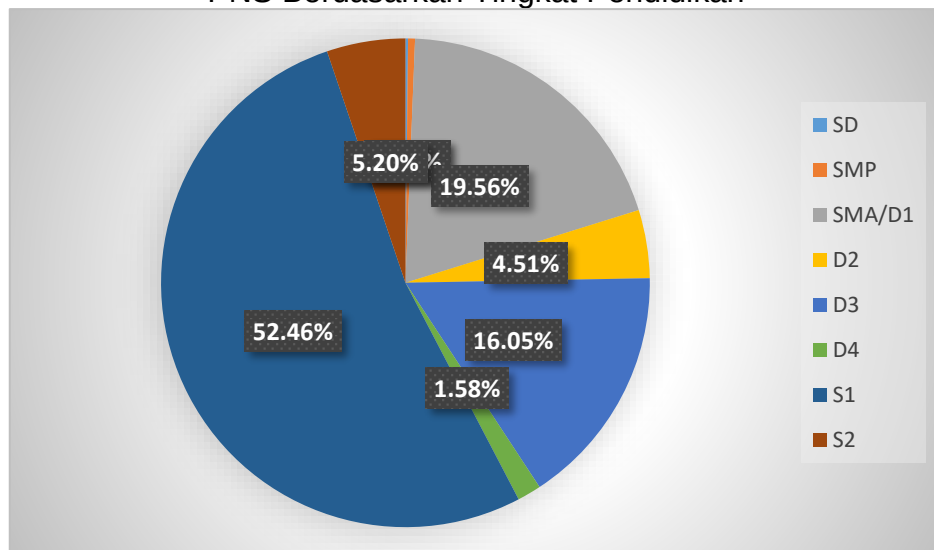
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu

c) PNS Menurut Pendidikan Formal

Pada akhir Desember 2022, PNS yang berpendidikan SD sebanyak 8 orang (0.17%), selanjutnya secara berturut-turut PNS berpendidikan SMP sebanyak 21 orang (0.46%), SMA/D1 sebanyak 902 orang (19.56%), D2 sebanyak 208 orang (4,51%), D3 sebanyak 740 orang (16.05%), dan D4 sebanyak 73 orang (1.58%), S1 sebanyak 2419 (52,46%) S2 sebanyak 240 orang (5.20%). Distribusi PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.3.
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

f.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian Keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan Keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.



f. 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *'value for money'*. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

f.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA).

Pada tabel 1.7. disampaikan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut.



Tabel 1.7.
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.602.108.166.748,43	1.564.137.729.318,63
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.553.704.498,20	70.355.446.187,97
4.1.01.	Pajak Daerah	17.500.000.000,00	16.455.782.266,53
4.1.02.	Retribusi Daerah	6.652.650.000,00	4.995.795.080,83
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.926.125.609,76	13.926.125.609,76
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	30.474.928.888,44	34.977.743.230,85
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.469.984.908.895,23	1.435.922.742.812,23
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.405.988.817.494,00	1.371.757.544.638,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.996.091.401,23	64.176.198.174,23
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.569.553.355,00	57.848.540.318,43
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.770.268.003,00	1.841.511.272,95
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.799.285.352,00	56.007.029.045,48
5.	BELANJA DAERAH	1.664.425.301.707,00	1.611.893.867.044,25
5.1.	BELANJA OPERASI	1.068.241.150.866,00	1.024.510.859.810,71
5.1.01.	Belanja Pegawai	537.392.076.469,00	518.016.053.503,50
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	397.618.178.799,00	376.886.850.942,58
5.1.05.	Belanja Hibah	124.165.420.598,00	121.091.269.614,63
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	7.069.940.000,00	7.000.937.500,00
5.2.	BELANJA MODAL	244.801.053.141,00	236.641.069.647,54
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	8.932.275,00	8.932.275,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.310.956.427,00	31.089.317.183,01
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.587.678.623,00	86.778.054.668,79
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119.295.312.363,00	114.323.298.911,74
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.598.173.453,00	4.441.466.609,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.523.896.000,00	5.206.963.640,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.253.896.000,00	5.206.963.640,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	346.129.201.700,00	345.534.973.946,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	2.427.770.000,00	22.427.770.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	343.701.431.700,00	343.107.203.946,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(62.317.134.958,57)	(47.756.137.725,62)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	86.317.134.958,57	86.317.134.958,57
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.317.134.958,57	74.317.134.958,57
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.317.134.958,57	74.317.134.958,57
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	62.317.134.958,57	62.317.134.958,57
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	14.560.997.232,95

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan per 31 Desember 2022 (unaudited) di keluarkan tanggal 15 Februari 2023

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, suatu kebijakan pembangunan dimaknai sebagai prioritas pembangunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan harus dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam RKPD selama lima tahun. Berdasarkan hasil telaah dan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni: “Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

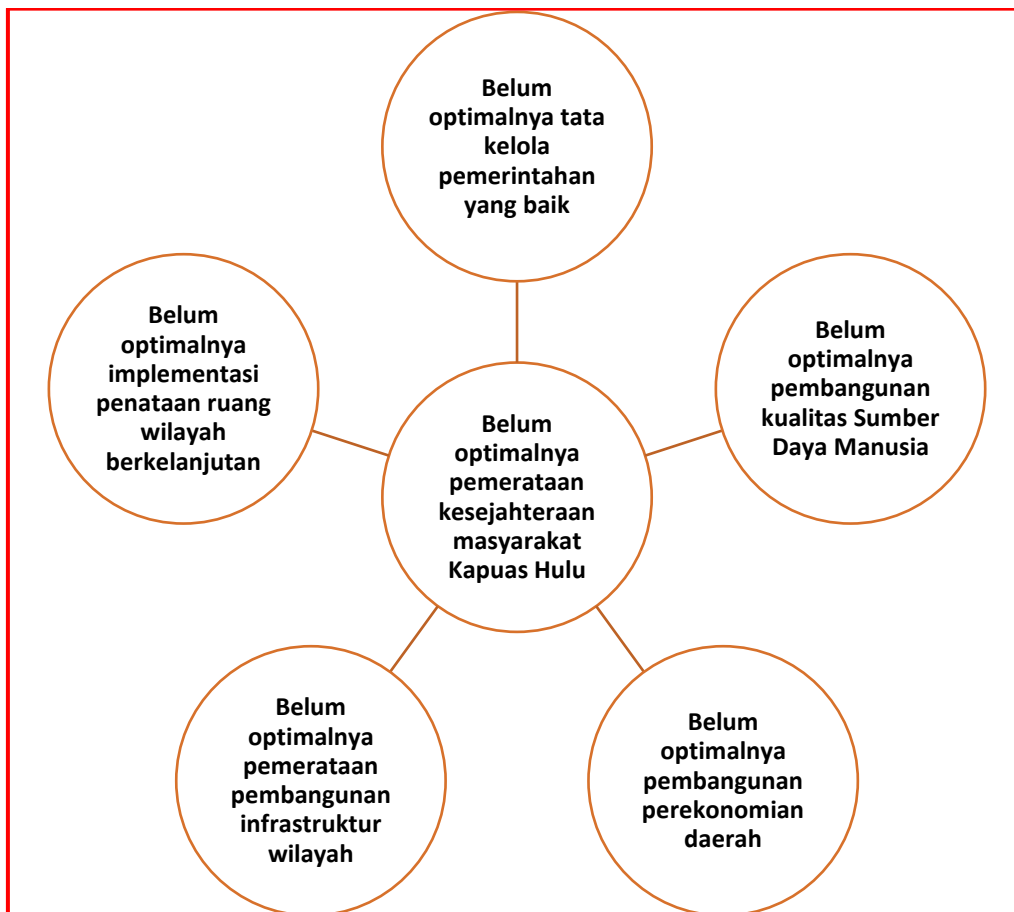
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
- Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia



- c. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
- d. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
- e. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 1.4
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.



Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terwujud. Beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: Belum optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan Belum optimalnya penegakan hukum dan perdataperkada.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Beberapa capaian kinerja



urusan keuangan daerahpun masih belum memuaskan pada tahun 2019 seperti persentase peningkatan PAD yang belum optimal dengan realisasi 11,81 persen (capaian 62,15%), persentase belanja pegawai terhadap modal belum maksimal dengan capaian 79,70 persen dan persentase belanja modal terhadap total belanja yang masih kurang dengan capaian 67,15 persen.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), permasalahan yang sering terjadi seperti tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya perencanaan pembangunan yang disusun dimana penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang belum maksimal dengan capaian hanya 88,65 persen dan persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target hanya sebanyak 58,97 persen.



Gambar 1.5.
Penyelesaian Tindak Pidana
Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian	
	Tahun 2019	Tahun 2022
Pontianak Kota	85,27	74,13
Singkawang	103,35	80,76
Kayong Utara	89,04	69,62
Melawi	91,56	89,13
Sekadau	98,44	75,54
Kapuas Hulu	77,78	80,00
Sintang	77,79	80,41
Ketapang	93,69	85,38
Sanggau	75,68	80,91
Mempawah	98,56	91,52
Landak	88,03	84,52
Bengkayang	96,17	88,61
Sambas	106,50	116,61
Kalimantan Barat	89,27	87,51

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023

Dari sisi perwujudan kondusivitas wilayah, penyelesaian tindak pidana secara umum di Kalimantan Barat belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya kasus tindak pidana mampu diselesaikan. Terlebih Kabupaten Kapuas Hulu yang hanya sebesar 77,78 persen kasus yang mampu diselesaikan. Terlihat pula capaian target kinerja pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagian besar masih belum optimal seperti rasio personil satpol PP sebesar 37,66 persen, cakupan petugas linmas 34,92 persen, pembinaan politik 66,67 persen maupun penegakan perda sebesar 72 persen. Hal ini menjadikan permasalahan tersendiri karena menimbulkan keresahan masyarakat.



2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya dimana angka Kabupaten Kapuas Hulu masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten/kota pada tahun 2019 IPM dengan capaian 65,65 masih jauh di bawah angka tertinggi IPM Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak yang mencapai 79,35. Angka ini juga ditunjukkan dengan masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (7,47 tahun); Harapan Lama Sekolah (12,04 tahun); Angka Harapan Hidup (72,44 tahun); dan Paritas Daya Beli (7.206 ribu rupiah per tahun/kapita).

Rendahnya komponen IPM tersebut mengindikasikan belum optimalnya capaian kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di dalamnya capaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat agar mampu diantisipasi dan diselesaikan segala kendala pembangunan, khususnya pendidikan dan kesehatan yang



secara langsung memperlihatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja maupun tenaga kerja.

Tabel 1. 8
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	IPM		RLS		HLS		AHH		PPP	
	Tahun 2019	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2002	Tahun 2019	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2022
Sambas	67,02	67,95	6,70	6,74	12,60	12,70	68,83	69,39	9.924	10.462
Bengkayang	67,57	68,74	6,53	7,00	12,08	12,14	73,67	74,00	9.182	9.484
Landak	65,96	67,17	7,10	7,15	12,39	12,44	72,70	73,39	7.403	7.969
Mempawah	65,50	66,94	6,82	7,17	12,33	12,87	70,90	71,47	7.913	8.049
Sanggau	65,67	66,91	6,95	7,41	11,56	11,65	71,35	71,58	8.410	8.782
Ketapang	67,16	67,92	7,26	7,48	11,79	11,95	71,01	71,27	9.259	9.426
Sintang	66,70	67,86	6,89	7,36	12,02	12,29	71,62	72,12	8.823	8.858
Kapuas Hulu	65,65	66,70	7,47	7,59	12,04	12,14	72,44	72,69	7.206	7.668
Sekadau	64,34	65,58	6,60	7,12	11,57	11,90	71,65	72,39	7.640	7.556
Melawi	65,54	66,81	6,67	7,18	11,15	11,18	72,88	73,14	8.465	8.830
Kayong Utara	62,66	63,81	6,00	6,21	11,81	11,95	68,11	68,82	7.905	8.234
Kubu Raya	67,76	68,91	6,82	7,02	13,64	13,88	70,43	70,95	8.773	9.124
Kota Pontianak	79,35	80,48	10,14	10,44	14,99	15,02	72,80	73,46	14.515	15.141
Kota Singkawang	71,72	72,89	7,72	8,19	12,89	12,92	71,85	72,46	11.789	12.089
Kalimantan Barat	67,65	68,63	7,31	7,59	12,58	12,66	70,56	71,02	9.055	9.355

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, Tahun 2020 dan Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa berdasarkan data awal perencanaan, pada tahun 2022 terdapat peningkatan IPM Kabupaten Kapuas Hulu menjadi 66,70 namun masih berada di bawah IPM Kalimantan barat sebesar 68,63. Angka ini juga ditunjukkan dengan masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (7,59 tahun); Harapan Lama Sekolah



(12,44 tahun); Angka Harapan Hidup (72,69 tahun); dan Paritas Daya Beli (7.668 ribu rupiah per tahun/kapita).

Gambar 1.6
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Sambas	33,06	30,85	31,06	28,63	33,45
Kabupaten Bengkayang	42,96	36,19	24,05	21,63	28,89
Kabupaten Landak	37,40	35,64	33,29	26,53	34,68
Kabupaten Mempawah	33,36	33,51	26,87	21,91	35,69
Kabupaten Sanggau	25,06	23,77	33,31	23,26	28,76
Kabupaten Ketapang	19,35	19,40	15,31	11,18	8,07
Kabupaten Sintang	20,00	20,27	20,92	21,48	18,44
Kabupaten Kapuas Hulu	23,84	21,71	27,35	20,99	31,26
Kabupaten Sekadau	38,81	31,62	25,65	19,20	31,14
Kabupaten Melawi	30,23	31,02	22,99	20,05	44,21
Kabupaten Kayong Utara	29,73	23,19	31,25	23,61	40,85
Kabupaten Kubu Raya	29,25	29,64	25,15	20,93	16,52
Kota Pontianak	26,61	26,56	21,48	17,98	15,63
Kota Singkawang	25,82	28,21	32,06	25,93	32,2
Kalimantan Barat	28,68	27,52	25,84	21,32	25,30

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023

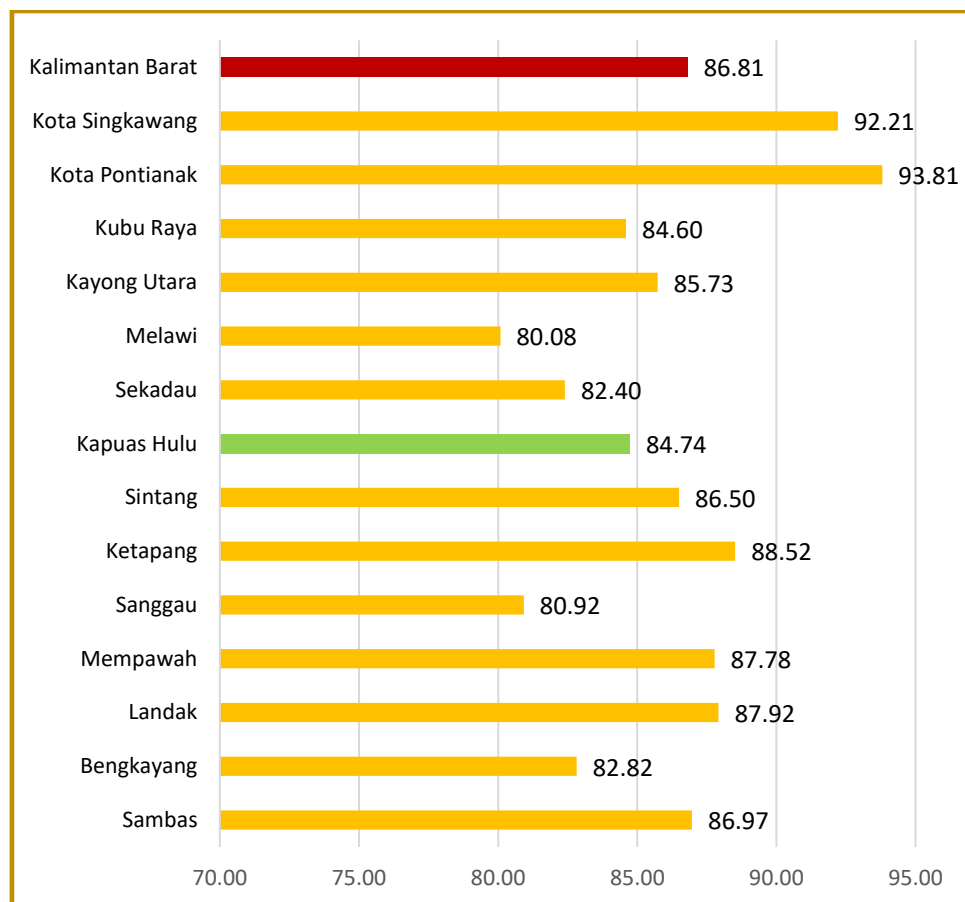
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat juga terlihat dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dimana pada tahun 2019 sebanyak 21,71 persen penduduk mengeluhkan kesehatan mereka. Dari sini terlihat kesehatan lingkungan juga masih belum cukup berkualitas sehingga menyebabkan keluhan kesehatan masyarakat cukup tinggi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan Keluhan Kesehatan penduduk kabupaten Kapuas Hulu menjadi 31,26 persen lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.



Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih jauh dari harapan untuk menyetarakan gender dalam lingkup pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Terlihat bahwa baik angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya capaian indikator terkait penyetaraan gender ini menjadi asumsi awal bahwa pembangunan gender di Kabupaten Kapuas Hulu belum membuahkan hasil dan harus terus dilakukan inovasi-inovasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang pro kesetaraan gender.

Gambar 1.7
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka,

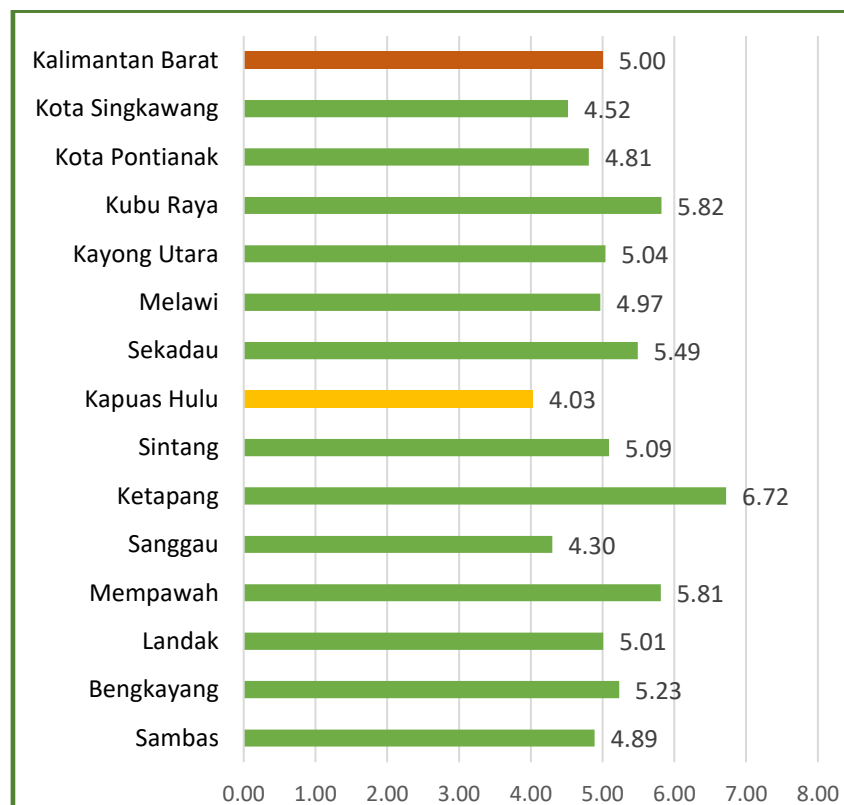


3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perlambatan pada tahun terakhir. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat masa Pandemi COVID-19 saat ini perlambatan akan terus terjadi bahkan bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan negatif.

Gambar 1.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019



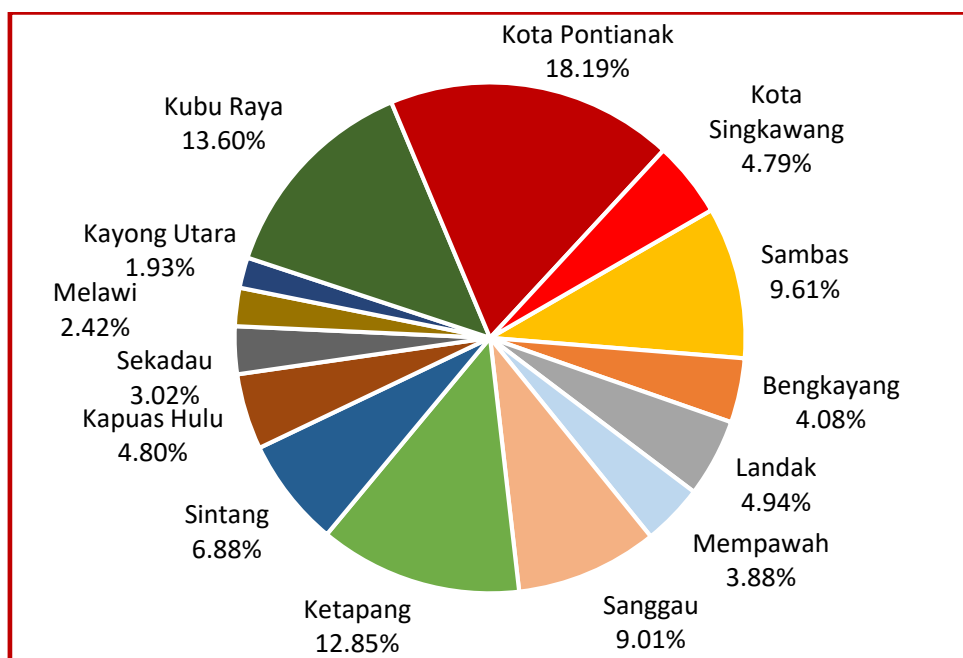
Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka



Terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu merupakan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan Barat dengan capaian 4,03 persen. Kewaspadaan dalam melihat fenomena ini perlu dirumuskan pemecahannya mengingat ke depan, laju pertumbuhan ekonomi akan lebih sulit dicapai dengan adanya berbagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selain dari pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa kontribusi perekonomian Kapuas Hulu terhadap agregat perekonomian Kalimantan Barat masih belum optimal. Sebesar 4,80 persen perekonomian Kalimantan Barat disumbang dari perekonomian di Kapuas Hulu.

Gambar 1.9
Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka

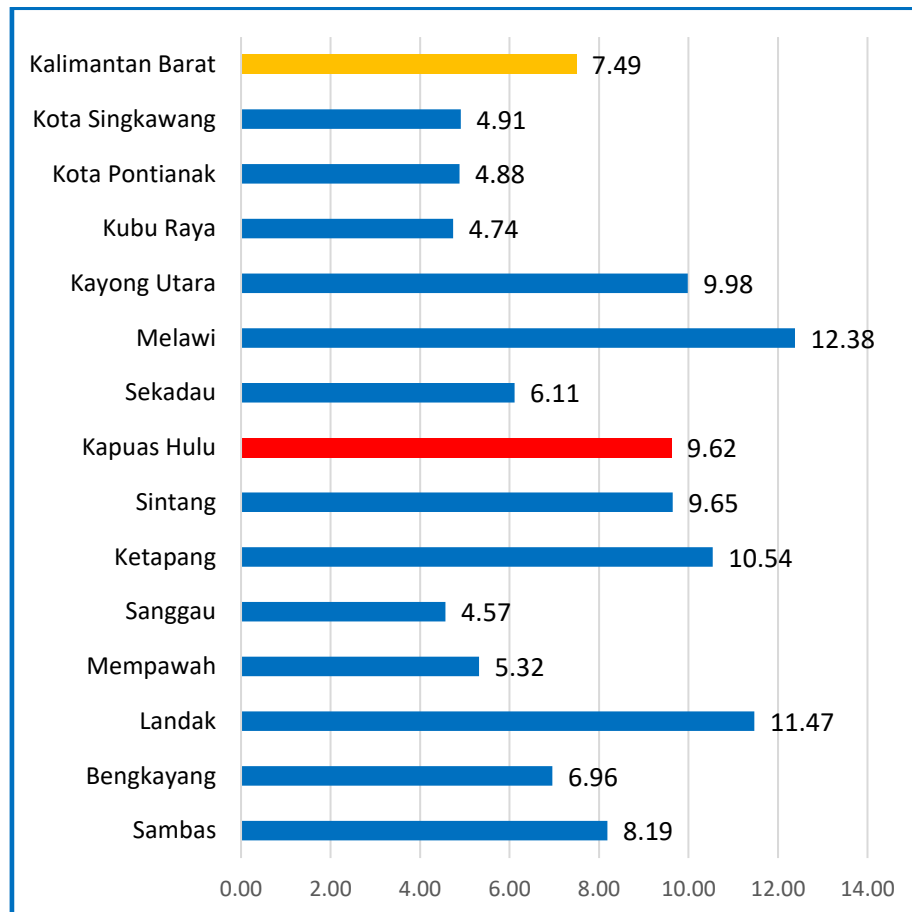


Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu (9,62%) berada jauh di atas angka kemiskinan provinsi yang mencapai 7,49 persen. Selain masih cukup tinggi kemiskinan dibanding wilayah lain, series angka kemiskinan di Kapuas Hulu juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka kemiskinan ini mengindikasikan cukup banyaknya masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan sehingga ketika terjadi gejolak perekonomian akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Poin ini akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar segera melakukan upaya-upaya strategis dalam mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan. Sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan nasional dan daerah harus padu dan sejalan sehingga dalam mengentaskan kemiskinan dapat relevan dan tepat sasaran.



Gambar 1.10
Angka Kemiskinan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka,

4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu kendala



pembangunan Kapuas Hulu yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di dalam Kapuas Hulu maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Kapuas Hulu menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparaturnya pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparaturnya pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparaturnya tersebut akan dapat optimal terlaksana manakala ada dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan.

Dari sisi fasilitas perumahan dan kesehatan, terlihat masih minimnya akses rumah tangga ke fasilitas sanitasi layak maupun air minum layak. Hal ini tentu sejalan dengan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan lingkungan, yang masih perlu banyak pembenahan. Terlihat bahwa akses rumah tangga terhadap sanitasi layak hanya sebesar 57,88 persen dan akses rumah tangga terhadap air minum layak sebesar 44,71 persen.



Tabel 1.9
Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Sambas	73,04	81,83	87,63	92,66	90,43
Kabupaten Bengkayang	56,02	77,76	80,33	82,17	79,53
Kabupaten Landak	21,75	46,88	51,22	62,85	66,00
Kabupaten Mempawah	55,95	74,71	82,16	83,95	79,44
Kabupaten Sanggau	39,15	62,00	70,12	70,34	64,98
Kabupaten Ketapang	55,35	76,68	82,51	75,46	74,10
Kabupaten Sintang	16,78	57,73	56,09	65,33	73,63
Kabupaten Kapuas Hulu	7,40	57,88	54,74	69,70	60,31
Kabupaten Sekadau	34,95	64,75	75,45	69,63	72,33
Kabupaten Melawi	41,11	61,70	67,95	71,62	65,50
Kabupaten Kayong Utara	53,31	62,90	63,19	71,34	77,87
Kabupaten Kubu Raya	71,24	72,98	77,89	75,74	73,52
Kota Pontianak	93,61	94,05	96,12	96,48	98,13
Kota Singkawang	89,19	89,91	88,38	92,21	93,70
Kalimantan Barat	53,97	72,08	75,81	78,39	77,41

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023

5. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di Kabupaten Kapuas, Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dirumuskan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fisik lainnya masih belum memperhatikan RTRW ini secara optimal. Hal ini menyebabkan masih belum sinkronnya implementasi penataan ruang wilayah yang berujung pada terjadinya bencana maupun buruknya tata kelola perkotaan. Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar



dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan sumber daya alam tak terbaharukan harus dikendalikan dan diawasi dalam “pengerukan”nya agar tidak terjadi degradasi lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi besar aktivitas perekonomian yang merusak lingkungan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bahkan pada struktur ekonomi, sektor ini cukup memberikan pengaruh pada nilai PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, dari sisi perijinan maupun pengawasan kegiatannya harus dilakukan secara ketat sehingga mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup Kapuas Hulu.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kapuas Hulu.

Lima pokok permasalahan yang telah dijabarkan tersebut merupakan akibat dari permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap Perangkat daerah yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan urusan setiap perangkat daerah. Berikut



permasalahan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel.1.10
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelayanan public
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
	Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintah
	Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia	Merebaknya Pandemi COVID-19
	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah
	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan
	Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja
	Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak
Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah	Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan
	Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya



Permasalahan Pokok	Permasalahan
	Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu
	Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal
	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
	Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), semua Provinsi serta Kabupaten dan Kota wajib menyusun RPJPD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Selanjutnya RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Serta, Memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Dan Program Satuan Kerja



Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode tahun 2016-2021. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah **“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**.

Visi tersebut menjadi arah pembangunan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 menuju kondisi ideal yang diinginkan. Visi tersebut terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Harmonis:** mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
- b. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.



- c. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
- d. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara Pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Penjabaran dari misi dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama, Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan

Dinamika kehidupan terus berkembang menjadi semakin beragam dan kompleks sehingga perlu keasadaran hidup secara selaras dan harmonis. Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan keberagaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras dan suku. Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan. Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong (hoaks) atau informasi yang bersifat provokatif. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:



- a. Menciptakan keamanan swakarsa dan mebina pengembangan komunitas religius dan budaya masyarakat
 - b. Melibatkan tokoh masyarkat dan aparat dalam mendukung program pengamanan swakarsa
 - c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat kabupaten Kapuas Hulu, terhadap anti-diskriminasi, terorisme dan paham radikal
 - d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat daam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik serta budaya gotong royong
 - e. Memberikan apresiasi di bidang agama, seni dan budaya tradisional
 - f. Mengembangkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya
 - g. Melakukan pembinaan terhadap kelompok kesenian, organisasi sosial dan oembentukan forum pembaruan kebangsaan.
- 2. Misi kedua, Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi**

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, daerah masih bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan menengah memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu, Adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM.

Peningkatan nilai perekonomian terutama di sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.



Pengembangan perekonomian juga bisa dimulai dari desa dengan dilakukannya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan sebagai basis ekonomi kerakyatan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah sehingga dapat diterima pasar nasional dan internasional
- c. Membangun tata kelola niaga hasil industri kecil dan menengah menuju pasar ekspor.
- d. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- e. Menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
- f. Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi dan menumbuh-kembangkan dunia usaha kecil dan menengah.
- g. Menyediakan aksesibilitas dan pengembangan lembaga keuangan untuk pengembangan dunia usaha yang produktif
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pemasaran untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
- i. Mengembangkan kawasan agropolitan, pariwisata dan perikanan.
- j. Mendorong dan meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- k. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19.



3. Misi ketiga, Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan kemajuan teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai pendidikan budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif. Di masa pandemi, kualitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk diperhatikan pemerintah daerah kabupaten kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memenuhi standar nasional.
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Menyiapkan program pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar.
- d. Membebaskan biaya pendidikan dasar dan bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa.
- e. Mengembangkan pendidikan non-formal dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum untuk menekan angka buta huruf
- f. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.



- g. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, membangun sekolah unggulan, serta asrama pelajar dan mahasiswa, dan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kebudayaan.
- h. Mengoptimalkan pendokumentasian kebudayaan sebagai panduan melakukan akselerasi kapitalisasi modernisasi kebudayaan dalam pembangunan.

4. Misi keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:



- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
- b. Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
- c. Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
- d. Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan e-government
- f. Mendukung pemberian penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah yang berprestasi.
- g. Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
- h. Meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.
- i. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah.

5. Misi kelima, Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang tidak bisa diprediksi hingga kapan. Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.



Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
- b. Menerapkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang profesional
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan.
- e. Membangun rumah singgah bagi masyarakat miskin yang sakit, dan ibu hamil dari pedalaman.
- f. Meningkatkan pelayanan jaringan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam pengentasan stunting/gizi buruk.
- g. Mengoptimalkan sarana dan prasana penunjang pelayanan kesehatan di dusun, desa, dan kecamatan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka dirumuskan strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk



mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan. Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan dan disertai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Adapun Program-program pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan untuk masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.11.
Program-Program Pembangunan Daerah berdasarkan
RPJMD Tahun 2021-2026

NO	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	BPBD
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
2	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
3	Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DISPENBUD
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISPORAPAR
5	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
		Program Pengembangan UMKM	DINKOPUKMP
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERINTRANS
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPUKMP
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DINKOPUKMP



NO	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengembangan Umkm	DINKOPUKMP
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKESPPKB
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISPANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISPANGAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian,	DISPANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISPANGAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISPANGAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPANGAN
6	Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
7	Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPORAPAR
8	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Program Penataan Desa	DPMD
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD
9	Meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOSPPA
		Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSPPA
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISPANGAN



NO	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DINKOPUKMP
		Program Pengembangan Umkm	DINKOPUKMP
		Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DINSOSPPA
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINSOSPPA
		Program Perlindungan Perempuan	DINSOSPPA
		Program Pemberdayaan Sosial	DINSOSPPA
		Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSPPA
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DINKESPPKB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DINKESPPKB
8	Pendayagunaan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERINTRANS
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERINTRANS
10	Peningkatan kualitas iklim investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPSTP
		Program Promosi Penanaman Modal	DPMPSTP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPSTP
		Program Promosi Penanaman Modal	DPMPSTP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP
11	Peningkatan Kualitas koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DINKOPUKMP
12	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM	DINKOPUKMP



NO	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB
13	Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	PRKPPLH
14	Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah		
15	Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PRKPPLH
16	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan, serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PRKPPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	PRKPPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	PRKPPLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	PRKPPLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	PRKPPLH
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	PRKPPLH
17	Penyediaan RDTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	DPUPR
18	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan	DISPENBUD
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKESPPKB
19	Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
20	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH



NO	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB
	teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
21	Peningkatan sistem pelayanan publik	Program Aplikasi Informatika	KOMINFO
		Program Aplikasi Informatika	KOMINFO
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	KOMINFO
		Program Penataan Bangunan Gedung	PUPR
		Program Pendaftaran Penduduk	DUKCAPIL
		Program Pencatatan Sipil	DUKCAPIL
22	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
23	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPPEDA
24	Peningkatan Sitem Pelaksanaan SPBE	Program Aplikasi Informatika	KOMINFO
25	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	KOMINFO
26	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
27	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	Program Kepegawaian Daerah, Program pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
28	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR



NO	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB
	Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPR
		Program Pengembangan Perumahan	PRKPPLH
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	PRKPPLH
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
29	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKESPPKB
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKESPPKB
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKESPPKB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKESPPKB
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKESPPKB

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPd

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPd) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 merujuk pada program prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 dan dirancang berdasarkan perencanaan pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berbagai urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan



yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Kapuas Hulu. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut disampaikan Program dan Kegiatan Prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

Tabel 1.11.
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan sesuai RKPD Tahun 2022

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, Ketertiban dan Toleransi antar Sesama Umat Beragama	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	BPBD
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	BPBD
Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya	Mewujudkan kehidupan beragama, kearifan lokal, pelestarian dan pemantapan nilai-nilai budaya, memperkuat jaringan pengamanan sosial, peningkatan pembinaan organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	DISPENBUD
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
	kepemudaan, peningkatan kelembagaan adat.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda	DISPORAPAR
Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pasar tradisional, pariwisata berbasis potensi lokal, tenaga kerja bersertifikat.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Batas Desa	DPMD
		Program Pengembangan UMKM	% UMKM naik Kelas	DINKOPUKMP
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	DISNAKERINTRANS
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan Pasar	DINKOPUKMP
	Pembinaan terhadap koperasi, pelaku usaha mikro, industri kecil dan menengah, memberi bantuan modal dan kemudahan dalam dunia usaha.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam	DINKOPUKMP
		Program Pengembangan Umkm	% UMKM naik Kelas	DINKOPUKMP
	Peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah dan pasca Pandemi COVID-19.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan	DINKESPPKB
	Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi komoditas unggulan daerah.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	DISPANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	DISKAN



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
	Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian dan perikanan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	DISKAN
	Mendorong kajian dan legalitas tanaman kratom.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan	BAPPEDA
	Peningkatan sarana, prasarana dan pusat pelatihan, pembinaan di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, serta bantuan bibit dan benih.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	DISPANGAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian,	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	DISKAN
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase temuan penyakit hewan yang dapat ditindaklanjuti	DISPANGAN
	Gerakan masyarakat menanam tanaman produktif.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	DISPANGAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPANGAN



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin	Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang diarahkan kepada peningkatan produksi budidaya sistem CBF	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun	DISKAN
	Meningkatkan produksi perikanan budidaya yang diarahkan kepada kemampuan pokdakan untuk memproduksi pakan alami dan bibit secara mandiri	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	DISKAN
	Diarahkan kepada kawasan - kawasan yang potensial sebagai sumber daya ikan yang telah memiliki jaringan jalan yang terkoneksi kepada pusat-pusat pemasaran	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun	DISKAN
Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan	Mengembangkan Kawasan Desa wisata, kebudayaan, pariwisata alam, promosi pariwisata, melibatkan masyarakat lokal.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISPORAPAR
Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Percepatan peningkatan status IDM	Program Penataan Desa	Persentase Penyelesaian Batas Adminisrasi Desa	DPMD
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	% Bumdesma	DPMD
Meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya	Optimalisasi sosial safety Net (jaringan Pengaman Sosial), meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan perikanan, pemberian akses permodalan dan pemasaran, mengembangkan kewirausahaan dan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	DINSOSPPA
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	DINSOSPPA



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
	kemitraan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi desa.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Pertanian	DISPANGAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Benih yang di Produksi dalam ekor/tahun	DISKAN
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah potensi ikan dalam Kg/Ha/ tahun	DISKAN
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam	DINKOPUKMP
		Program Pengembangan Umkm	% UMKM naik Kelas	DINKOPUKMP
	Perlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan dan bidang usaha. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku, penguatan informasi Keluarga Berencana dan Konseling untuk kelompok muda, perbaikan sistem manajemen Keluarga Berencana (data, informasi).Peningkatan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.	Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1. Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan, 2. Persentase Pemberdayaan Sosial, 3. Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia, 4. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 , 6. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	DINSOSPPA



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
	Penguatan kapasitas kelembagaan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta Pelayanan Perempuan Dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		DINSOSPPA
	Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terselesaikan	DINSOSPPA
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial	DINSOSPPA
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia	DINSOSPPA
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	DINKESPPKB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	DINKESPPKB
Pendayagunaan Tenaga Kerja	Penguatan Kerjasama Lintas Instansi terkait Pelatihan dan Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	DISNAKERINTRANS
	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	DISNAKERINTRANS



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan kualitas iklim investasi daerah	Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah minat investor	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP	DPMPTSP
	Mendorong investasi masuk ke dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyebaran investasi yang berkualitas dan berkeadilan, menyiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai kebutuhan industri, optimalisasi infrastruktur.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah minat investor	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase dokumen perizinan diterbitkan sesuai SOP	DPMPTSP
Peningkatan Kualitas koperasi	Pembinaan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam	DINKOPUKMP
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM	% UMKM naik Kelas	DINKOPUKMP
Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah	Peningkatan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan lokal	PRKPPLH
Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah				
Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	PRKPPLH



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan, serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota	Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran (institusi dan non-institusi), penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, mengoptimalkan pengendalian pencemaran (baku mutu) dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang representatif.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	PRKPPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pemenuhan layanan persampahan	PRKPPLH
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan kebersihan dan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pemenuhan layanan persampahan	PRKPPLH
	Pengembangan Ruang terbuka hijau(RTH) melalui hutan/taman kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase penambahan tutupan lahan	PRKPPLH
	Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	PRKPPLH
	Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase penetapan pengakuan dan perlindungan MHA serta kearifan lokal	PRKPPLH
Penyediaan RDTR	Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		DPUPR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Kepatuhan IMB (%)	DPUPR
Peningkatan kualitas dan aksesibilitas	Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis,		Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia	DISPENBUD



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
pelayanan pendidikan dan Kesehatan	bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa, Pembangunan dan rehabilitasi untuk ruang kelas dan rumah Dinas Tenaga Pendidik (Tendik) serta Regrouping sekolah dasar.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dini, Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A , Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A , Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs.	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan	DINKESPPKB
Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM	Pemberdayaan dan pengembangan SDA dan SDM	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui Program Padat Karya tunai.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH
Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten dan Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH
	Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	BAPPEDA



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
	Kantor Pelayanan Publik yang representatif.			
	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase disiplin ASN	BKPSDM
	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	INSPEKTORAT
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal "BB"	INSPEKTORAT
	Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	INSPEKTORAT
Peningkatan sistem pelayanan publik	Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan <i>e-government</i>	Program Aplikasi Informatika		KOMINFO
	Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah	Program Aplikasi Informatika		KOMINFO



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Informasi Dan Komunikasi Publik		KOMINFO
	Membangun Fasilitas pelayanan publik, rumah singgah dan sarana olah raga.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB (%)	PUPR
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP	DUKCAPIL
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	DUKCAPIL
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi tata kelola keuangan daerah dan penertiban aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	BKAD
Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	BAPPEDA
Peningkatan Sitem Pelaksanaan SPBE	Optimalisasi Sitem Pelaksanaan SPBE	Program Aplikasi Informatika		KOMINFO
Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Informasi Dan Komunikasi Publik		KOMINFO
Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	INSPEKTORAT
Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	Peningkatan jenjang pendidikan ASN	Program Kepegawaian Daerah, Program pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase disiplin ASN	BKPSDM
	Akses pengembangan kompetensi bagi ASN			
	Peningkatan disiplin ASN			
	Peningkatan kinerja ASN yang terukur dan akuntabel			
	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat			



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi serta Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi baik	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi baik	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	DPUPR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik	DPUPR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	PRKPPLH
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		PRKPPLH
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi baik	DPUPR
Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar	Percepatan penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan	DINKESPPKB
	Pembangunan rumah singgah masyarakat miskin yang sakit dan Ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan	DINKESPPKB



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	PD PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan	DINKESPPKB
	Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan yang berorientasi pada pencapaian standar pelayanan minimal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	DINKESPPKB
	Peningkatan akses dan mutu kefarmasian	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kefarmasian, Alkes dan Optikal	DINKESPPKB

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Hukum Penerapan SPM

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akutanbel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya mengurangi variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar



Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas urusan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara umum, kebijakan penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, mendorong transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemerintah. Adapun pedoman penyelenggaraan SPM yang terkait dengan mutu pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;



- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Standar Minimal Bidang Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
- g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berkaitan dengan penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu.



b. Kebijakan Umum SPM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Sebagai upaya penerapan SPM di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang dicapai melalui kebijakan perbaikan kualitas layanan publik, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas dan fungsi unit kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pembiayaan melalui APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan indikator kinerja makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Adapun capaian Kinerja Makro tahun 2022 dan peningkatan atau pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,75	66.70	1.445%
2	Angka Kemiskinan	8,93%	8,59%	-3.807%
3	Angka Pengangguran	4,18%	2.21%	-47.129%
4	Pertumbuhan Ekonomi	6.510.870.000.000	6.804.580.000.000	4.511 %
5	Pendapatan Per Kapita	43.635.000	47.793.000	9.529 %
6	Ketimpangan Pendapatan	0,278	0,318	14,388

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

Berikut disampaikan capaian indikator kinerja kunci keluaran (*output*) pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



1. URUSAN PENDIDIKAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah Satuan pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	144	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3745		
3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3745		
4.	Jumlah kebutuhan minimal pen-didik PAUD (Negeri dan Swasta)	390		
5.	Jumlah Pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	973		
6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yg memiliki ijazah D-IV atau S-1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	204		
7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	98		
8.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	456		
9.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	31383		
10.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	14190		
11.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31383		
12.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14190		
13.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3296		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
14.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1315		
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1395		
16.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	681		
17.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan swasta)	450		
18.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	339		
19.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	433		
20.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	135		
21.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan sertifikat pendidik	1141		
22.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan sertifikat pendidik	650		
23.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	251		
24.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	21		
25.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	15		
26.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat.	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
27.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	5		
28.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	491		
29.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	491		
30.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	155		
32.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	100		
33.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV dan S-1	66		
34.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	251		
35.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	2		

2. URUSAN KESEHATAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3		
3.	Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk pelayanan antenatal yang tersedia	460253		
4.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sesuai standar	646		
5.	Jumlah dukungan logistik kesehatan pelayanan persalinan yang tersedia	36752		
6.	Jumlah SDM kesehatan utk pelayanan persalinan sesuai standar	646		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
7.	Jumlah dukungan logistik kesehatan pelayanan neonatal esensial yang tersedia	26387		
8.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	646		
9.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan neonatal esensial	189260		
10.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	774		
11.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita	92350		
12.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	705		
13.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia utk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	527581		
14.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun sesuai standar	92		
15.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun	76537		
16.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar	156		
17.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas	3377		
18.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	92		
19.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi Kartu Menuju Sehat Anak Sekolah	9437		
20.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	92		
21.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita DM	100		
22.	Jumlah SDM kesehatan untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Berat sesuai standar	32		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
23.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita ODGJ Berat	11199		
24.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	62		
25.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita TBC	46289		
26.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV sesuai standar	125		

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten(ha)	0	Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air	
2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0		
3.	Luas kawasa permukiman sepanjang pantai yang rawan abarasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	45,312 ha		
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	4968 ha		Bangunan Perkuatan Tebing
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten	Tidak Ada		
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kerenangan kabupaten	Tidak Ada		
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	489.54m		Bangunan Perkuatan Tebing
8.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	11716.59		
9.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	19471.32		
10.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
11.	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya	
12.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten	Tidak ada		suket
13.	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggara SPAM	Tidak Ada		
14.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		suket
15.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah lain	0		suket
16.	Jumlah rumah dengan akses unti pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	350		
17.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1200		
18.	Jumlah rumah dengan akses unti pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	1550		
19.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
20.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0		
21.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1270		
22.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	45.73%		
23.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	45.57%		
24.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	22.58%		
25.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	45.57%		
26.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0		Tidak memiliki mobil tinja
27.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
28.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	75.49%		
29.	Kinerja Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
30.	Rasio bangunan gedung(kecuali rumahtinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0		
31.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	1		
32.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada		
33.	Penetapan keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada		
34.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	13 buah		
35.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	0 buah		
36.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	1892 buah		
37.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	57 buah		
38.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	1106.148	Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air	
39.	Panjang jalan yang dibangun	0		
40.	Panjang jembatan yag dibangun	177.3		
41.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	6247 Km		
42.	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	0		
43.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	6.433 Km		
44.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	193.4 M		
45.	Panjang jalan yang dipelihara	58.227Km		
46.	Panjang jembatan yang dipelihara	193.4 M		
47.	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1		
48.	Jumlah tenaga kerja operator/ teknis/analisis yang terlatih di wilayah kab./kota	40		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
49.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten	40		
50.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi/cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	100		
51.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten	100		
52.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab. untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	100		
53.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	100		
54.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	100		
55.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	100		
56.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	1		
57.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab./kota yg dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.	100		
58.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten	100		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
59.	Tersedia data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	100		
60.	Tersedia data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
61.	Tersedia data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
62.	Tersedia data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang jadi kewenangan pengawasannya	100		
63.	Tersedia data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
64.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	0		
65.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wil. kabupaten	0		
66.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten	0		
67.	Jumlah badan usaha yg mendapatkan pembinaan di wil. Kab.	0		
68.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0		
69.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	0		
70.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	5		
71.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang menjadi kewenangan pengawasannya			

4. PERUMAHAN RAKYAT

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	59860	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	14756		
3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	26789		
4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
10.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
11.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
12.	Jumlah rumah tangga penerima keg.layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
13.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
14.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
15.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		
16.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	12.04		
17.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0		
18.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		
19.	Jumlah rumah di kab/kota	59173		
20.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	1997		
21.	Jumlah rumah tidak layak huni	27987		
22.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		Belum pernah dilakukan pendataan terhadap rumah yang tidak dihuni
23.	Rasio rumah dan KK	1,45		
24.	Jumlah rumah pembangunan baru	0		
25.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	438		
26.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0		
27.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	438		
28.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0		
29.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0		Tidak terdapat Perumahan yang terfasilitasi RTNH
30.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0		Pemasangan PJU merupakan kewenangan PLN
31.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
32.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0		
33.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		



5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	33	Satpolpp	
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	20		Belum terdapat Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6		
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0		Sampai dengan tahun 2021 belum ada Pol PP yang memiliki sertifikat PPNS
5.	Tersedianya SOP dlm penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1		
6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	27		
7.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		
9.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0		
10.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0		
11.	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	0,06%		
12.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,05%		
13.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0		
14.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,41%		
15.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0		
16.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
17.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		
18.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%		
19.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	2 2		
20.	Tersedianya pos sektor damkar yg dilengkapi sarana prasarana damkar dan penyelamatan di kantor kecamatan	0		
21.	Tersedianya aparatur selama 24 jam yg dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0		
22.	Pos Damkar yang dilengkapi dgn sarpras damkar, penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0		
23.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	522		
24.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yg memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0		
27.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau PD yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	120		
28.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0		



6. URUSAN SOSIAL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	7	Dinas Sosial P3A dan P2KB	
2.	Jumlah data penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0		tidak terdapat Disabilitas, anak dan lanjut usia terlantar
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1		
4.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang dijangkau	0		
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1		
6.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0		
7.	Jumlah rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		
8.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang menerima paket sandang	0		
9.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0		
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0		Belum tersedia alat bantu pada rumah singgah
11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0		Pada Dinas Sosial P3A P2KB Belum tersedia paket kesehatan untuk perbekalan
12.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0		
13.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		belum disediakan tenaga kesehatan untuk rumah singgah
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	23		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
15.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yg mendapatkan bombing-an fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/pusat kesejahteraan sosial	0		
16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan	0		tidak melaksanakan bimbingan sosial
17.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0		
18.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0		
19.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1		
20.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	1		
21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0		
22.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	83357		
23.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	24		
24.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		tidak terdapat penampungan pengungsi milik Pemerintah Daerah
27.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		tidak terdapat kelompok rentan
28.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		tidak terdapat korban bencana yang membutuhkan pelayanan psikososial



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
29.	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ relawan sosial yang tersedia	97		

7. URUSAN TENAGA KERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 (Ada)	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dlm rencana tenaga kerja	100,00%		
3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0		
4.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100 %		
5.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0,00%		
6.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	37.5%		
7.	Persentase LPK yang terakreditasi	25 %		
8.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%		
9.	Jumlah penganggur yang dilatih	8		
10.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%		
11.	Persentase penyerapan lulusan	87.5%		
12.	Lulusan bersertifikat kompetensi	0%		
13.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan peaihan	0		
14.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0		
15.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	90.48%		
16.	Data tingkat produktivitas total	-	BPS	
17.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	54.41 %		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
18.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	91.67%		
19.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	11		
20.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100 %		
21.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	60.63%		
22.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0.95 %		
23.	Jumlah mogok kerja	0		Pada Tahun 2021 tidak terjadi Pemogokan Kerja
24.	Jumlah penutupan perusahaan	0		Pada Tahun 2021 Tidak terjadi Penutupan Perusahaan
27.	Jumlah perselisihan kepentingan	0		Pada Tahun 2021 tidak terjadi perselisihan kepentingan
28.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		Pada Tahun 2021 tidak terjadi perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Perusahaan
29.	Jumlah perselisihan PHK	1		
30.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	153		
31.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0		
32.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kab./kota yg diberdayakan	1		
33.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	66.67 %		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
34.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	146		
35.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	347		
36.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	4		
37.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab./kota	0		
38.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0		Tidak terdapat Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
39.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		Tidak terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten
40.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	9		
41.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0		
42.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
43.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yg terdata	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
44.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
45.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yg mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
46.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
47.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		



8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab./kota yg telah dilatih PUG	0	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	
2.	Jumlah program/kegiatan PUG pada PD yg sudah dievaluasi melalui analisis gender di tk. Kab./kota	0		
3.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1		
4.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0		
5.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00%		
6.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0		
7.	Jumlah lembaga layanan anak yg mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota	0		
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yg bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab./kota yg mendapatkan pelatihan	0		
9.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0		
10.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0		
11.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		
12.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0		
13.	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0		
14.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00%		



9. URUSAN PANGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	6		
2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	1		
3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0		
4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	7		
5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1		
6.	Tertanganinya kerawanan pangan	0		
7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0		
8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	37		

10. URUSAN PERTANAHAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	0		sejak tahun 2018, izin lokasi diterbitkan OSS (pusat)
2.	SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absntee dan Daftar Subyek	1		
3.	SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0		
4.	Dokumen Izin membuka tanah	0		
5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		



11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Hasil perhitungan provinsi terhadap a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKD) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	58,89 89,87 89,18	Dinas Lingkungan Hidup	
2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota :	19		
3.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pem.kab./kota	9		
4.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab./Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemkab.kota	55,56		
5.	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	0		
6.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		Tidak ada Kegiatan Pelatihan bagi MHA dan Lembaga Masyarakat
7.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemkab./kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab./kota yang ditangani	100		

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Penerbitan akta perkawinan	72174	Dinas	
2.	Penerbitan akta perceraian	730	Kependudukan	
3.	Penerbitan akta kematian	4112	dan Pencatatan	
4.	Penyajian data kependudukan	3	Sipil	

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	9		Pada Tahun 2020 Tidak terdapat fasilitasi kerjasama antar Desa



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	9		Hanya terdapat 3 Desa pada tahun 2019 yang melaksanakan kerjasama antar Desa
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yg terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	59		
4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	93		

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	-	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pada Tahun 2022 delum terdapat Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan
2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	29.3		
3.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	69.9		
4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	80.65%		
5.	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	5124		
6.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	15.28%		
7.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	66.53%		
8.	Pemerintah Daerah Kab./Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	39		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
9.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	89.37%		
10.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	9.22%		
11.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	47.75%		

15. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100,00%	Dinas Perhubungan	
2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	35.15%		
3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0		Belum ada Perda/Perbup tentang Tarif Angkutan
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	65.77%		

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0,00%	Dinas Kominfo dan statistik	Tidak terdapat Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau yang menggunakan akses internet yang diamankan oleh Dinas Kominfo
2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	2		
3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	0		
5.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	58%		
6.	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplemen-tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yg ditetapkan se-suai dgn ketentuan per-UU-an	20%		
7.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yg tercantum dalam dokumen proses bisnis yg telah diimplementasikan secara elektronik	75		
9.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	12.5		
10.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	62,5%		
11.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yg terintegrasi dgn sistem penghubung layanan pemerintah	20		
12.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0		
13.	Persentase PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0		
14.	Persentase PD yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0%		
15.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	3.7		
16.	Persentase PD yg mengimplemen-tasi inovasi yg mendukung smart city	0,00%		
17.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	22.22%		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
18.	Tersedianya Perda atau Perkada terkait implementasi e-government	2		
19.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis Pem.Prov. yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan Pem.Kab.	100%		
20.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	3,03%		
21.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	60%		

17. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm kab./kota	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22.14%		
4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm daerah kab./kota	5.54%		
5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.43%		
6.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm daerah kab./kota	0.04%		
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian utk	4.43%		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	koperasi dgn wil.keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%		
9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dlm daerah kab. /kota	12.18%		
10.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dlm daerah kab./kota	0%		
11.	Persentase yg diberikan dukungan fasilitasi pemasaran utk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5.54%		
12.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
13.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5.54%		
14.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10.86%		
15.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	12.29%		
16.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0		
17.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi dan sertifikasi produk usaha standarisasi	0		
18.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0		
19.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.65%		
20.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0		



18. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Belum ada PERDA tentang pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		Belum ada SOP tentang pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		Belum ada pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1		
5.	Kegiatan pameran penanaman modal	0		
6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	80		
8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3365		OSS (UMK 567 Izin, Non UMK 130) dan Sicantik 498
9.	Laporan realisasi penanaman modal	3.114 M		
10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	0		
11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	147		
12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	40		

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	113		
3.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesuka-	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	relawan dan kepeloporan pemuda			
4.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
5.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	118		
6.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	10		Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah tidak melaksanakan event Olah Raga Prestasi tingkat daerah dikarenakan Pandemi Covid-19

20. URUSAN STATISTIK

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya buku profil daerah	Tidak	Dinas Kominfo dan statistik	Belum terdapat Buku Profil Daerah
2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1		Belum pernah dilaksanakan survey statistik sektoral
3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	330		
4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0		Belum Pernah dilaksanakan survey statistik sektoral
5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0		
6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	50%		
7.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	3.7%		



21. URUSAN PERSANDIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		
2.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah	0		
3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0		
4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0		

22. URUSAN KEBUDAYAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	13		
3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	13		
4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yg dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	13		Pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan peningkatan kapasitas bagi penjaga situs
5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1		
6.	Perlindungan cagar budaya kab./kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1		
7.	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	tidak ada		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8.	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	40		
9.	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	13		
10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	tidak ada		Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki museum
11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	tidak ada		
12.	Peningkatan akses masyarakat dlm pengelolaan sarana dan prasarana museum dan pelaksanaan kegiatan museum Kabupaten / Kota	tidak ada		
13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1		
14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	tidak ada		
15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	tidak ada		
16.	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
17.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	tidak ada		

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	7.07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2,36%		
3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	6%		
4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1.09%		
5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	6292		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
6.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
7.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		Belum ada naskah kuno yang dialih aksara dan bahasa
8.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		

24. URUSAN KEARSIPAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%		
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	499		
4.	Persentase jumlah arsip yg dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		
5.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada		Pada Tahun 2021 tidak dilaksanakan Pemusnahan Arsip akibat bencana sesuai NSPK
6.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1		
7.	Penyelamatan arsip PD Kab./Kota yg digabung dan/ dibubarkan dan pemekaran daerah/kecamatan/ kelurahan/desa yang sesuai NSPK di Kabupaten	3,7		
8.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yg dikelola oleh lembaga kearsipan kab. yg sesuai NSPK	Tidak Ada		
9.	Pencarian arsip statis yg pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab. yang dinyatakan hilang dlm bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada		
10.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab. yang sesuai NSPK	Tidak Ada		



25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	10	Dinas Perikanan	
2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	6		
3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kab./kota yang diterbitkan	114		
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	68		
5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	1.219.140		

26. URUSAN PARIWISATA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	24		
2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	8		
3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	71		
4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2519		Wisatawan Mancanegara tidak didata berdasarkan Kebangsaan
5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6		
6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0		
7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	425		
8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0		
9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0		
10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pembinaan kemitraan usaha masyarakat			

27. URUSAN PERTANIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	138	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	1060		
3.	Jumlah Penerbitan izin usaha pertanian	21		Pada Tahun 2021 tidak terdapat fasilitasi izin usaha pertanian
4.	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100%		
5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten	100%		Pada Tahun 2021 tidak terdapat usulan izin usaha pertanian
6.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%		Bencana yg dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular

28. URUSAN PERDAGANGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase perizinan yg diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0 0 0		
2.	Persentase penerbitan TDG	0	Dinas PTSP	
3.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0		
4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0		
5.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
6.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0		
7.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab.	0		
8.	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0		
9.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	6.25		
10.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0		
11.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	196.070		
12.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	18.02%		
13.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		

29. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
2.	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	30%		
3.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100 %		
4.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0		
5.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	0		



30. URUSAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	20	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	20		
3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	4		

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Hasil (*Outcome*) adalah hasil yang dicapai dalam jangka menengah, menggambarkan hasil aktual atau yang diharapkan dari barang/jasa/kegiatan/layanan yang telah dihasilkan, berupa peningkatan kuantitas/kualitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas dan atau peningkatan pendapatan. Indikator hasil dijadikan landasan untuk menilai apakah hasil yang diperoleh dalam bentuk output dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan bagi masyarakat. Berikut disampaikan capaian indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yg berpartisipasi dlm PAUD	48.897%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	84.795%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 th yg berpartisipasi dlm pendidikan menengah pertama	88.65%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.912%		
2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	90.755	Dinas kesehatan	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	100%		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	55.022%		
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	65.752%		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	70.852 %		
		Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar	65.081%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95.035%		
		Persentase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95.956%		
		Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76,552%		
		Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65.055%		
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
		Persentase ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan-an	99.254%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		kesehatan jiwa sesuai standar			
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99.228%		
3.	Pekerjaan Umum	Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten.	-	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA	
		Rasio Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yg terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	13.132%		
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	72.283%		
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	56,729%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	45,729%		
		Rasio Kepatuhan IMB	100%		
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	67.10%		
		Rasio tenaga Operator/ teknisi/analisis yg memiliki sertifikat Kompetensi	100%		
		Rasio Proyek yg menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	88.636%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	
		Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	0		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani	3,783%		
		Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	31,521%		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0,74		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan	100,00%		
		Persentase PERDA dan PERKADA yg ditegakkan	100,00%		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	100		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,38		
		jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100		
		persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%		
		waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9.11		
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar dan gepeng yg terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdaya-an Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	96.124%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab.			
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yg mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1.542%		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	31983924794,36		
		Persentase perusahaan yg menerapkan tatakelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenaga-kerjaan)	60.635%		
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	47.55%		
8.	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,011%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%		
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,541%		
9.	Pangan	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dgn peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah	
		Persentase Penetapan tanah utk pembangunan fasilitas umum	0		
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0		
		Tersedianya Tanah Obyek landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal	0		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		dari Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee			
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0		
		Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100		
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	78.07		Tidak Ada Pelanggaran
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	19,005%		
		Ketaatan Penanggung-jawab usaha dan/atau keg. thd izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	0		
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	97.906 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	66.994 %		
		Kepemilikan akta kelahiran	98.3%		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	22 %		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	33.333%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	90.909%		
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	TFR (angka kelahiran total)	2.33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	66.15%		
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,947%		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten	69,2 %	Dinas Perhubungan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten	0.45		
16	Komunikasi Dan Informatika	persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yg	2 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14.286 %		
		persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pem.Kab.	88.22%		
17	Koperasi Usaha Kecil Menengah	peningkatan koperasi yang berkualitas	12.915%	Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	
		meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	27.926%		
18	Penanaman Modal	persentase peningkatan investasi di Kabupaten	348.483 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Kepemudaan Dan Olahraga	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,156%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3.299%		
		peningkatan prestasi olahraga	27		Tahun 2020 Tidak ada Event Olahraga dikarenakan Pandemi Covid-19
20	Statistik	persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dlm menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dlm melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00%		
21	Persandian	tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	0	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Tidak melaksanakan kegiatan persandian



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
22	Kebudayaan	tingkat pelestarian cagar budaya	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	38.17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum terdapat data
		indeks pembangunan literasi masyarakat	34.63		Belum terdapat data
24	Kearsipan	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggung jawaban nasional (Psl. 40 dan Psl. 59 UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0		Belum terdapat data
25	Kelautan Dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kab./Kota di wil.Provinsi (sumber data : one data KKP)	117.717	One Data KKP	
26	Pariwisata	persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	11002.381%	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase peningkatan wisatawan nusantara yg datang ke Kabupaten	233.783%		
		tingkat hunian akomodasi	12.507%		Berdasarkan data tingkat Hunian akomodasi Disporapar Bidang Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah kamar tersedia dan kamar terjual sebesar 015.007
		kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kab. (harga berlaku)	1.787		dalam jutaan rupiah



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kab. (harga berlaku)	2,824		Diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pada LRA APBD tahun 2021
27	Pertanian	produktivitas pertanian per hektar per tahun	225.401	Dinas Pertanian dan Pangan	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun berdasarkan Data ATAP Prov. Kalbar sebesar 29,02 kw/ha dengan perhitungan Jumlah produksi pertanian pangan per tahun dibagi luas panen (tanpa dibagi perhektar pertahun dan dikali 100%)
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-45.531%		Peningkatan kejadian penyakit/kasus pada tahun 2021 karena terjadi wabah virus African Swine Fever (ASF) yang menyerang hewan Babi yang mana tingkat kematiannya hingga 100%. selain itu juga penyakit rabies yang masih ada terjadi di Kapuas Hulu.
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	27,914%	Dinas Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	37.31%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	18.024%		
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	5,411%	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30%		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	53.704%	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yg lokasinya di daerah Kabupaten	0		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
1.	Perencanaan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	9.686%	Badan Keuangan Daerah	
		Rasio PAD	4.391%	Badan Keuangan Daerah	



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Inspektorat Kabupaten	
		peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Inspektorat Kabupaten	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	53.574%	Badan Keuangan Daerah	
		Opini Laporan Keuangan	100(WTP)	Inspektorat Kabupaten	
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yg dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		Persentase jumlah pengadaan yg dilakukan dgn Metode Kompetitif	1,382 %		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	98.411%		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-18.668		
3.	Kepegawaian	Rasio PNS Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar(%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	165.226%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio PNS Fungsional (%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23.926%		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi(%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28.783%		
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1.3174%	Badan Keuangan Daerah	Tidak Terjadi Deviasi
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5.9204%		Tidak Terjadi Deviasi
		Assets Management :			



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		1. Apakah ada Daftar Aset tetap?	100		
		2. Apakah ada manual utk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	100		
		3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	100		
		4. Apakah nilai asset tercantum dlm laporan anggaran? (Ya/Tidak)	100		
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4.117%		
5	Transparasi Dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	59.609%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		akses publik terhadap informasi keuangan daerah	59.119%		

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Bupati Kapuas Hulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen dan kesepakatan antara Bupati Kapuas Hulu dengan para Kepala Perangkat Daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yg disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap-tiap sasaran yang telah ditetapkan.



Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. IKU tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Adapun Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2022
1.	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
2.	Meningkatnya Toleransi, Kesenjangan dan Kerja Sama Antar Umat Beragama	2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	78
3.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	3. Indeks Resiko Bencana	126,64
4.	Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	70
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,10 %
		6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,0 %
		7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,18 %
		8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-10,52 %
6.	Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri	9. Jumlah Desa Mandiri	43 desa
7.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	36,14 %
8.	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	9,30 %



Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2022
9.	Meningkatnya Investasi Daerah	12. Nilai Realisasi Investasi	547,29 milyar
10.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing	13. Persentase Usaha Mikro	93,02 %
		14. Persentase Koperasi Aktif	39,30 %
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41
12.	Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	16. Persentase RDTR	13,04 %
13.	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,53 tahun
14.	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,91 tahun
15.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat	19. Angka Harapan Hidup	72,42 tahun
16.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	20. Pengeluaran Perkapita (000 Rp/Kapita/Thn)	7,428
17.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21. Nilai SAKIP	BB
18.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5
19.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	23. Opini BPK	WTP
20.	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	24. Predikat SPBE	Baik
21.	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	25. Predikat KIP	Informatif
22.	Meningkatnya Maturitas SPIP	26. Level Maturitas SPIP	3
23.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas dan Profesional	27. Indeks Profesionalitas ASN	48,25
24.	Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten	28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	67 %
25.	Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Desa	29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	60 %



Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2022
26.	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	79,66 %
27.	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	75,55 %
28.	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi	32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	74,66 %
29.	Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100 %
30.	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	43,85 %
31.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten	35. Resiko Konektivitas Kabupaten	61,10
32.	Meningkatnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	75
33.	Meningkatnya Mutu Fasyankes Dasar dan Rujukan	37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	70

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, berdasarkan target perjanjian kinerja pada tahun 2022, maka perlu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel. 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	78	79,11	101,42%
3. Indeks Resiko Bencana	126,64	138,70	90,48%
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	70	80,25	114,64%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,10%	4,26%	387,27%
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,0%	13,44%	1.344,00%
7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,18%	2,71%	52,32%
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-10,52%	-	-
9. Jumlah Desa Mandiri	43 desa	53 desa	123,26%
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	36,14%	33,28%	92,09%
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	9,30%	2,02%	21,72%
12. Nilai Realisasi Investasi	547,29 milyar	2.974,39 milyar	543,48%
13. Persentase Usaha Mikro	93,02%	99,96%	107,46%
14. Persentase Koperasi Aktif	39,30%	40,96%	104,22%
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	78,07	104,92%
16. Persentase RDTR	13,04%	4,35%	33,36%
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,53 tahun	12,14 tahun	96,89%
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,91 tahun	7,59 tahun	95,95%
19. Angka Harapan Hidup	72,42 tahun	72,69 tahun	100,37%
20. Pengeluaran Perkapita	7.428.000 Rp/kapita/thn	7.668.000 Rp/kapita/thn	103,23%
21. Nilai SAKIP	BB	B	97,99%
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	81,56	101,32%
23. Opini BPK	WTP	-	-
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	100 %
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	100 %
26. Level Maturitas SPIP	3	2,655	88,50%
27. Indeks Profesionalitas ASN	48,25	38,14	79,05%
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	67%	67,10%	100,15%
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	60%	29,79%	49,65%
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	79,66%	56,73%	71,22%



Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	75,55%	45,73%	60,53%
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	74,66%	72,28%	96,81%
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	0%	0%
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	43,85%	3,78%	8,62%
35. Rasio Konektivitas Kabupaten	61,10	69,20	113,26%
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	75	82,38	109,83%
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	70	83,50	119,29%

Berdasarkan tabel diatas dalam rata – rata kinerja sasaran pada indikator makro telah tercapai 86,48 %, hal ini menunjukkan masih ada beberapa indikator sasaran strategis yang masih belum tercapai. Secara umum capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tercapai bahkan ada beberapa target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah melampaui target tahun 2022 dan bahkan melampaui target akhir periode RPJMD tahun 2026 yang sudah ditetapkan.

Adapun 4 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yaitu Presentase penempatan tenaga kerja terlatih tercapai 21,72%, Presentase RDTR tercapai 33,36%, Presentase Panjang jalan pada status ruas jalan desa dengan kondisi mantap tercapai 49,65%, Presentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani tercapai 8,62%.

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk



mencapai target kinerja sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Secara spesifik tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran tahun sebelumnya disebabkan adanya perbedaan tujuan dan sasaran indikator pada periode RPJMD 2021-2026. Untuk memberikan gambaran umumnya terhadap pencapaian sasaran indikator tahun 2022 maka akan diperbandingkan dengan data awal periode RPJMD 2021-2026.

Berikut disampaikan perbandingan hasil capaian indikator kinerja tahun 2021 dan tahun 2022.

Tabel. 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran	Target	Kondisi awal 2021	Realisasi 2022	Progres
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100 %
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	78	76	79,11	4,09 %
3. Indeks Resiko Bencana	126,64	129,23	138,70	7,33 %
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	70	-	80,25	
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,10 %	-0,65 %	4,26 %	-755,38 %
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,0 %	-10,01 %	13,44 %	-234,27 %
7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,18 %	4,98 %	2,71 %	-45,58 %
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-10,52 %	-12,90 %		
9. Jumlah Desa Mandiri	43 desa	37 desa	53 desa	43,24 %
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	36,14 %	35,43 %	33,28 %	6,07 %
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	9,30 %	5,14 %	2,02 %	-60,70 %
12. Nilai Realisasi Investasi	547,29 Milyar	546,57 Milyar	2.974,39 Milyar	444,19 %
13. Persentase Usaha Mikro	93,02 %	92,56 %	99,96 %	7,99 %
14. Persentase Koperasi Aktif	39,30 %	37,35 %	40,96 %	9,67 %
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,41	74,17	78,07	5,26 %



Indikator Sasaran	Target	Kondisi awal 2021	Realisasi 2022	Progres
16. Persentase RDTR	13,04 %	4,35 %	4,35 %	0,00 %
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,53 tahun	12,05 tahun	12,14 tahun	0,75 %
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,91 tahun	7,52 tahun	7,59 tahun	0,93 %
19. Angka Harapan Hidup	72,42 tahun	72,36 tahun	72,69 tahun	0,46 %
20. Pengeluaran Perkapita	7.428.000 Rp/ Kapita/Thn	7.162.000 Rp/ Kapita/Thn	7.668.000 Rp/ Kapita/Thn	7,07 %
21. Nilai SAKIP	BB	B	B	
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	80,30	81,56	1,57 %
23. Opini BPK	WTP	WTP		
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	Baik	
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	Informatif	
26. Level Maturitas SPIP	3	3	2,655	-11,50 %
27. Indeks Profesionalitas ASN	48,25	48,19	38,14	-20,85 %
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	67 %	64 %	67,10 %	4,84 %
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan desa Kondisi Mantap	60 %	59 %	29,79 %	-49,51 %
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	79,66 %	78,76 %	56,73 %	-27,97 %
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	75,55 %	74,46 %	45,73 %	-38,58 %
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	74,66 %	71,66 %	72,28 %	0,87 %
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100 %	100 %	0 %	-100 %
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	43,85 %	37,55 %	3,78 %	-89,93 %
35. Resiko Konektivitas Kabupaten	61,10	56,20	69,20	23,23 %
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	75	-	82,38	
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	70	-	83,50	



Dari tabel 3.3. diatas dapat dilihat bahwa terdapat 8 indikator dari seluruh IKU yang mengalami penurunan capaian kinerja pada tahun 2022, indikator tersebut adalah : laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, persentase penempatan tenaga kerja terlatih, Level Maturitas SPIP, Indeks Profesionalisme ASN, persentase panjang jalan pada status ruas jalan desa dengan kondisi mantap, persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum, persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani.

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Target Kinerja Indikator Sasaran ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2026, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya selama tahun berjalan, setiap tahunnya ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibandingkan dengan target dalam RPJMD.

Tabel. 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan RPJMD

Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100%
2. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	88	79,11	89,90%
3. Indeks Resiko Bencana	116,3	138,70	80,74%



Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan	80	80,25	100,31%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	1,50%	4,26%	284%
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,20%	13,44%	320%
7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,98%	2,71%	45,32%
8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5,58%		%
9. Jumlah Desa Mandiri	67 desa	53 desa	79,10%
10. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	39,12%	33,28%	85,07%
11. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	20,82%	2,02%	9,70%
12. Nilai Realisasi Investasi	620,20 Milyar	2.974,39Milyar	479,59%
13. Persentase Usaha Mikro	93,72%	99,96%	106,66%
14. Persentase Koperasi Aktif	51,36%	40,96%	79,75%
15. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,05	78,07	104,02%
16. Persentase RDTR	65,22%	4,35%	6,67%
17. Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,04 tahun	12,14 tahun	93,10%
18. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,54 tahun	7,59 tahun	88,88%
19. Angka Harapan Hidup	73,51 tahun	72,69 tahun	98,88%
20. Pengeluaran Perkapita	7.963.000 Rp/kapita/thn	7.668.000 Rp/kapita/thn	96,30%
21. Nilai SAKIP	A	B	
22. Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81,56	100,69%
23. Opini BPK	WTP		
24. Predikat SPBE	Baik	Baik	100%
25. Predikat KIP	Informatif	Informatif	100%
26. Level Maturitas SPIP	3	2,655	88,50%
27. Indeks Profesionalitas ASN	50	38,14	76,28%
28. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	79%	67,10%	84,94%
29. Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan desa Kondisi Mantap	69%	29,79%	43,17%
30. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	87,03%	56,73%	65,18%
31. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	82,64%	45,73%	55,34%



Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
32. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	86,66%	72,28%	83,41%
33. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	100%	0,00%	0,00%
34. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani	69,05%	3,78%	5,47%
35. Resiko Konektivitas Kabupaten	80,70	69,20	85,75%
36. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur SDM	85	82,38	96,92%
37. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana	80	83,50	104,38%

2.3.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, dilaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel. 3.5.
Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 701.188.440.135,00	Rp. 679.473.618.589,32	96,90
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 87.135.671.164,00	Rp. 82.153.565.260,88	94,28
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 37.631.200,00	Rp. 31.823.200,00	84,57



	Program	Anggaran	Realisasi	%
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 330.427.000,00	Rp. 320.662.400,00	97,04
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 66.608.113.057,00	Rp. 56.966.765.630,67	85,53
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 25.919.874.000,00	Rp. 25.486.308.080,00	98,33
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 60.422.800,00	Rp. 55.595.762,00	92,01
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 57.600.000,00	Rp. 55.591.250,00	96,51
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 4.035.553.744,00	Rp. 3.643.187.336,74	90,28
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 19.835.007.800,00	Rp. 19.733.098.750,00	99,49
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 1.328.058.200,00	Rp. 1.327.224.500,00	99,94
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 122.890.000,00	Rp. 119.604.150,00	97,33
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 774.480.390,00	Rp. 729.575.390,00	94,20
14	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 64.926.142.646,00	Rp. 64.365.316.011,45	99,14
15	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 27.335.910.714,00	Rp. 26.731.088.399,68	97,79
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 109.557.071.187,00	Rp. 105.600.703.036,00	96,39
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 970.238.387,00	Rp. 877.853.600,00	90,48
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 989.778.000,00	Rp. 969.856.345,00	97,99
19	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 350.072.500,00	Rp. 348.923.044,00	99,67
20	Program Kawasan Permukiman	Rp. 695.297.700,00	Rp. 693.712.773,00	99,77



	Program	Anggaran	Realisasi	%
21	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.095.802.331,00	Rp. 1.080.758.900,00	98,63
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 538.643.600,00	Rp. 536.931.550,00	99,68
23	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 165.600.000,00	Rp. 165.600.000,00	100,00
24	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 149.908.400,00	Rp. 146.251.583,00	97,56
25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 5.635.076.520,00	Rp. 5.587.953.150,00	99,16
26	Program Penanganan Bencana	Rp. 93.809.600,00	Rp. 93.433.650,00	99,60
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 35.860.000,00	Rp. 35.860.000,00	100,00
28	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 13.000.000,00	Rp. 13.000.000,00	100,00
29	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 159.436.300,00	Rp. 159.436.300,00	100,00
30	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 4.497.900,00	Rp. 4.497.900,00	100,00
31	Program Hubungan Industrial	Rp. 55.046.200,00	Rp. 55.046.200,00	100,00
32	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 36.350.000,00	Rp. 36.160.000,00	99,48
33	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 33.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	100,00
34	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 198.677.900,00	Rp. 198.525.300,00	99,92
35	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 47.518.000,00	Rp. 47.457.600,00	99,87
36	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 29.803.800,00	Rp. 29.798.800,00	99,98
37	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Rp. 387.439.000,00	Rp. 72.834.900,00	18,80
38	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 307.439.000,00	Rp. 374.706.450,00	121,88
39	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan	Rp. 366.565.350,00	Rp. 361.472.150,00	98,61



	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Maksimum dan Tanah Absentee			
40	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 250.000.000,00	Rp. 230.553.626,00	92,22
41	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.278.873.250,00	Rp. 1.127.245.080,00	88,14
42	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.454.087.750,00	Rp. 1.289.874.580,00	88,71
43	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.964.570.500,00	Rp. 1.962.448.200,00	99,89
44	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 50.000.000,00	Rp. 33.775.574,00	67,55
45	Program Penataan Desa	Rp. 3.420.000.000,00	Rp. 3.221.849.556,71	94,21
46	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 64.973.000,00	Rp. 64.973.000,00	100,00
47	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 949.723.700,00	Rp. 948.885.110,00	99,91
48	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 3.435.578.200,00	Rp. 3.414.628.200,00	99,39
49	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 222.510.000,00	Rp. 182.767.390,00	82,14
50	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.957.506.300,00	Rp. 2.912.994.344,00	73,61
51	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.276.640.000,00	Rp. 325.910.000,00	25,53
52	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 2.970.696.214,00	Rp. 2.735.156.050,00	92,07
53	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.703.947.450,00	Rp. 1.385.905.123,79	81,33
54	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 268.697.508,00	Rp. 267.160.568,00	99,43
55	Program Aplikasi Informatika	Rp. 364.558.647,00	Rp. 361.325.898,10	99,11
56	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 80.190.300,00	Rp. 80.156.000,00	99,96



	Program	Anggaran	Realisasi	%
57	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp. 30.000.000,00	Rp. 29.986.950,00	99,96
58	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 145.900.000,00	Rp. 143.015.000,00	98,02
59	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 116.008.600,00	Rp. 115.803.600,00	99,82
60	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 782.923.000,00	Rp. 778.488.900,00	99,43
61	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 25.309.000,00	Rp. 24.835.195,00	98,13
62	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 75.000.000,00	Rp. 74.727.718,00	99,64
63	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 379.175.000,00	Rp. 369.988.000,00	97,58
64	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 59.999.800,00	Rp. 59.985.966,00	99,98
65	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 2.039.985.170,00	Rp. 1.925.821.346,00	94,40
66	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 4.075.078.300,00	Rp. 4.009.020.216,00	98,38
67	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 358.152.548,00	Rp. 352.386.926,00	98,39
68	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 38.918.650,00	Rp. 37.629.360,00	96,69
69	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 4.149.285.000,00	Rp. 4.079.675.200,00	98,32
70	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 1.105.738.000,00	Rp. 1.095.421.000,00	99,07
71	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 254.999.800,00	Rp. 252.683.800,00	99,09
72	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 10.699.300.600,00	Rp. 10.676.047.056,00	99,78
73	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 196.170.930,00	Rp. 195.502.530,00	99,66
74	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 39.643.000,00	Rp. 39.643.000,00	100,00



	Program	Anggaran	Realisasi	%
75	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1.873.057.250,00	Rp. 1.823.678.432,00	97,36
76	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 6.230.338.550,00	Rp. 4.304.385.750,00	69,09
77	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 49.952.750,00	Rp. 49.941.250,00	99,98
78	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 690.342.150,00	Rp. 688.497.247,00	99,73
79	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.348.234.000,00	Rp. 1.320.282.394,00	97,93
80	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 375.431.900,00	Rp. 372.938.580,00	99,34
81	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 424.003.000,00	Rp. 423.643.700,00	99,92
82	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 21.006.019.255,00	Rp. 20.258.123.309,00	96,44
83	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 237.031.000,00	Rp. 235.968.000,00	99,55
84	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 44.292.000,00	Rp. 44.252.000,00	99,91
85	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 145.537.600,00	Rp. 145.524.058,00	99,99
86	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 523.999.600,00	Rp. 517.562.800,00	98,77
87	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 25.000.000,00	Rp. 18.571.988,00	74,29
88	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.803.051.200,00	Rp. 1.786.084.300,00	99,06
89	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 116.008.600,00	Rp. 115.803.600,00	99,82
90	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 842.366.800,00	Rp. 840.763.450,50	99,81
91	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 143.129.200,00	Rp. 143.129.200,00	100,00



	Program	Anggaran	Realisasi	%
92	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 281.676.500,00	Rp. 281.676.500,00	100,00
93	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 63.165.205.090,00	Rp. 62.378.643.501,00	98,75
94	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.521.324.300,00	Rp. 2.477.234.950,80	98,25
95	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 13.321.031.100,00	Rp. 13.096.428.411,00	98,31
96	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.487.232.000,00	Rp. 1.485.726.900,00	99,90
97	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.434.849.800,00	Rp. 1.431.937.900,00	99,80
98	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 357.683.451.594,00	Rp. 356.421.640.695,00	99,65
99	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.352.489.878,00	Rp. 1.338.473.600,00	98,96
100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.382.947.941,00	Rp. 1.259.970.260,00	91,11
101	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2.270.014.000,00	Rp. 1.987.376.813,00	87,55
102	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 1.092.035.200,00	Rp. 1.070.085.024,00	97,99
103	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 540.554.000,00	Rp. 540.038.300,00	99,90
104	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 150.620.000,00	Rp. 150.322.500,00	99,80
105	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.018.536.000,00	Rp. 2.016.553.752,00	99,90
106	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 695.459.000,00	Rp. 693.166.700,00	99,67
107	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 259.817.000,00	Rp. 259.817.000,00	100,00
108	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.103.345.990,00	Rp. 3.025.798.498,00	97,50
109	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 160.843.500,00	Rp. 160.843.500,00	100,00



Program	Anggaran	Realisasi	%
110 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 139.730.000,00	Rp. 139.730.000,00	100,00
111 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 166.048.000,00	Rp. 164.476.800,00	99,05
112 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.151.307.000,00	Rp. 1.151.191.863,00	99,99
113 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 88.371.000,00	Rp. 87.270.234,00	98,75
114 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 213.973.000,00	Rp. 211.859.600,00	99,01
115 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 283.523.000,00	Rp. 282.663.000,00	99,70
Total	Rp. 1.663.245.441.290,00	Rp. 1.608.725.144.365,64	96,72

Realisasi anggaran Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 mencapai rata-rata 96,72% dengan kategori tinggi atau terealisasi secara optimal. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya. Jumlah program yang dikelola pada tahun 2022 sebanyak 115 program guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif/ Solusi Yang Telah Dilakukan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati



dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Utama daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*).

1. Sasaran Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

Berdasarkan realisasi capaian pada indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2022 sebesar 100%. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, melalui beberapa tahapan antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penegakan disiplin terhadap Peraturan Daerah guna menciptakan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Meningkatnya Toleransi Kesenjangan dan Kerjasama Antar Umat Beragama

Berdasarkan realisasi capaian pada indikator Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama tahun 2022 sebesar 79,11. Realisasi tersebut sumber data dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sampai dengan tahun 2022 Kementerian Agama melakukan survey terhadap kerukunan antar umat beragama di beberapa kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat. Untuk informasi secara spesifik indeks kerukunan umat beragama pada Kabupaten Kapuas Hulu tidak dilakukan survey, sehingga data yang bisa ditampilkan adalah data indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Strategi



pencapaian yang telah dilakukan antara lain dengan memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang menunjang terciptanya kerukunan antar umat beragama dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Sebagai rekomendasi terhadap pencapaian Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama tahun 2023 akan dilakukan survey secara mandiri kerjasama dengan Kementerian Agama terhadap Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Meningkatnya Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana

Berdasarkan realisasi capaian terhadap indikator Indeks Resiko Bencana sebesar 138,70. Indeks Resiko Bencana dilakukan penghitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan input data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaporkan secara periodik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023 sebesar 126,64. Dimana semakin tinggi capaian Indeks Resiko Bencana maka semakin tinggi juga resiko bencana yang terjadi di Kapuas Hulu. Jika dilihat dalam periode 2015-2022, skor Indeks Risiko Bencana mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pemenuhan salah satu indikator IKD yaitu adanya pembuatan draft Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan skor IRBI Kabupaten Kapuas Hulu, melalui sosialisasi dan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana. Sebagai rekomendasi teknis bahwa mengingat Dokumen Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Kapuas Hulu yang diterbitkan oleh BNPB berakhir pada tahun 2021



atau telah kadaluarsa masa berlakunya maka perlu menyusun dan menetapkan Kajian Resiko Bencana guna memenuhi salah satu komponen utama dalam indikator kapasitas penurunan indeks resiko bencana.

4. Meningkatnya Nilai-Nilai Luhur Budaya Daerah

Berdasarkan realisasi capaian Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 80,25. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu 126,64. Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan refleksi dari realisasi program-program yang dilaksanakan dan didorong oleh kondisi sosial budaya yang memiliki daya dukung yang cukup signifikan dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu. Faktor utama dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan adalah tingginya antusiasme masyarakat dalam melestarikan budaya dan tradisi, Seperti kita tahu bahwa Kalimantan memiliki potensi dengan karakter dan kondisi dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, tradisi luhur yang sangat dijunjung tinggi. Masyarakat sangat menjunjung tinggi tradisi luhur dan melestarikan cagar budaya dan warisan budaya, sedangkan pemerintah daerah mempunyai fungsi pembinaan dan fasilitasi dalam mengoptimalkan upaya pelestarian warisan budaya.

5. Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri

Berdasarkan data realisasi indikator jumlah desa mandiri adalah 53 desa, sedangkan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 43 desa dengan capaian 123,26 %.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni **Indeks Ketahanan Sosial**, **Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan**. Indeks Desa Membangun dikembangkan



berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun capaian status kemandirian desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan jumlah desa seluruhnya sebanyak 278 desa jika dibandingkan antara target sebanyak 43 desa dengan realisasi sebanyak 53 desa maka capaian desa yang memiliki status mandiri akhir tahun 2022 mencapai 129%. Rincian Status Kemandirian Desa Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Surat Keputusan Kementerian Desa, PDTT RI Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai kewenangan membangun desa dan desa membangun melakukan intervensi terhadap Indikator IDM yang masih kurang melalui program kegiatan pada OPD-OPD terkait, dan mendorong pihak swasta serta mendorong peran desa itu sendiri melalui kewenangan desa (desa membangun)



Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berbagai upaya pemberdayaan masyarakat guna mendorong masyarakat desa dalam membangun desa. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa pembinaan pengelolaan keuangan desa, pembinaan pengelolaan aset desa, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa agar tercipta perangkat desa yang terampil, responsibilitas dan akuntabilitas, fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa guna meminimalisir konflik antar desa. Peningkatan ekonomi masyarakat juga terus dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan kerjasama desa serta fasilitasi terhadap tim PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

6. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan realisasi indikator persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebesar 98,69 % dengan capaian 273,08 % dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Perkembangan penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kapuas Hulu cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya indikator kinerja persentase pelayanan kesejahteraan sosial adalah tersedianya sumber daya yang memadai, adanya kolaborasi lintas sektor non pemerintahan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, adanya regulasi daerah yang mendukung pencapaian pelayanan kesejahteraan sosial berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.



7. Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja

Berdasarkan data realisasi capaian sasaran indikator persentase penempatan tenaga kerja terlatih sebesar 2,02%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 9,30% maka capaiannya sebesar 21,72%.

Data pencari kerja yang terdaftar dalam layanan AK-1 pada tahun 2021 sebanyak 366 orang dan tahun 2022 sebanyak 347 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang produktif yang telah mendapatkan pelatihan untuk tahun 2021 sebanyak 10 orang dan tahun 2022 sebanyak 8 orang. Hal ini masih jauh dibanding dengan target yang harus terpenuhi sebanyak 35 orang mendapatkan pelatihan. Untuk tenaga kerja yang mendapatkan penempatan tenaga kerja sebanyak 7 orang tenaga kerja yang produktif yang telah mendapatkan pelatihan.

Sebagai upaya yang dapat dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu antara lain melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak swasta yang menyediakan kesempatan kerja. Selain itu juga menyediakan akses peningkatan tenaga kerja yang produktif melalui pelatihan-pelatihan dengan jumlah yang lebih banyak dengan dukungan sumber daya anggaran yang memadai.

8. Meningkatnya Investasi Daerah

Nilai realisasi investasi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjumlahan dari nilai investasi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan OSS RBA.

Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	299	546,57	183	398	694,34	174,46	547,29	2.974,39	543,48



Bahwa selama kurun waktu 2020-2022 nilai realisasi investasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan (di atas 100%) dari dokumen Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode 2021-2026. Peningkatan ini terjadi karena kesadaran masyarakat untuk membuat perizinan usaha semakin meningkat, serta meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki perizinan usaha sebagai legalitas usaha dan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki dan penambahan investasi dari *existing* perusahaan sawit di Kabupaten Kapuas Hulu.

Bahwa kenaikan dan penurunan nilai realisasi investasi di Daerah dipengaruhi oleh daya tarik investasi yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) yaitu kondisi perekonomian daerah, tersedianya infrastruktur, tersedianya sumber daya manusia dan kondisi keamanan, politik dan sosial budaya serta manajemen kualitas pelayanan/ kelembagaan yang dapat dikendalikan (*controllable*).

Upaya yang telah dilakukan melalui DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan realisasi investasi yaitu dengan mengoptimalkan peran pengendalian penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan memberikan bimbingan teknis dan pembinaan bagi perusahaan agar dapat melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya dengan benar dan tertib dan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar memenuhi komitmen melalui kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan.

9. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data realisasi indikator sasaran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 78,07 dengan kategori Baik. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati adalah 74,41, dengan



capaian 104,92%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 58,89 (sedang), Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 89,87 (baik) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot 89,18 (baik). Berdasarkan Capaian Kinerja pada IKA, IKU dan ITL tahun 2022 tersebut, diperoleh IKLH KABUPATEN tahun 2022 sebesar 78,07 atau kategori Baik. Nilai ini telah memenuhi target pada tahun 2022.

10. Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Berdasarkan data Realisasi indikator sasaran persentase RDTR sebesar 4,35% dengan target tahun 2022 sebesar 13,04% dimana capaian kinerja sebesar 33,36%. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- a. Rencana RDTR perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 23 kota Kecamatan;
- b. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 13, 04% untuk 3 Kecamatan antara lain : RDTR Kota Badau, RDTR Kota Putussibau Utara, RDTR Kota Putussibau Selatan;
- c. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berhasil ditetapkan adalah RDTR Kota Badau (4,35%), sedangkan untuk dua kota yang menjadi target yaitu Putussibau Utara dan Putussibau Selatan masih dalam proses pemenuhan syarat substansi yaitu penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;



Beberapa langkah strategis yang dapat diupayakan dalam penetapan RDTR kota Putusibau utara dan Putussibau Selatan dengan melakukan koordinasi intens dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu terhadap perkembangan proses pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sehingga bisa didorong untuk dapat segera di selesaikan.

11. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dan Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah

Berdasarkan data realisasi indicator sasaran Harapan lama sekolah sebesar 12,14 tahun, target tahun 2022 sebesar 12,53 dengan capaian 96,89% dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,59 tahun, target 72,42 tahun dengan capaian 100,37%. Hal ini bisa diartikan bahwa target Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2022 sudah tercapai. Peningkatan ini tidak lepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya Pendidikan. Selain itu melalui program beasiswa dan biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya mampu berkontribusi dalam mengurangi beban biaya sekolah bagi orang tua siswa. Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kapuas telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan melalui capaian indicator Kinerja Utama Bupati Kapuas Hulu.

12. Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat

Berdasarkan data realisasi indicator sasaran Angka Harapan Hidup sebesar 72, 69 tahun dan target tahun 2022 sebesar 72,42 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,37%.

Dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup masyarakat melalui upaya mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang



tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target pada RPJMD.

Peningkatan Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain factor Kesehatan yang menjadi salah satu yang berperan dalam memberikan akses pelayanan Kesehatan khususnya di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan Puskesmas yang tersebar diseluruh Kecamatan, maka harapannya masyarakat dapat mengakses fasilitas Kesehatan dengan mudah dan terjangkau. Kondisi wilayah yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam memberikan akses Kesehatan bagi masyarakat, namun upaya yang solutif akan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan dengan membentuk Puskesmas Pembantu.

13. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas dan Profesional

Berdasarkan data realisasi indikator sasaran Indeks Profesionalisme ASN dengan nilai 38,14. Nilai ini belum sepenuhnya memenuhi target tahun 2022 dengan nilai 48,25.

Indeks Profesionalisme ASN terdiri dari Indeks Profesionalisme Kualifikasi dengan nilai 11,91, Kompetensi dengan nilai 9,80, Kinerja dengan nilai 11,43 dan Disiplin dengan nilai 5,00. Jika dilihat dari data diatas yang mengalami penurunan nilai ada pada komponen kompetensi dan kinerja.

Beberapa kendala dan permasalahan yang mendasari penurunan Indeks Profesionalisme ASN adalah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, sehingga menyebabkan pejabat yang sudah melaksanakan pelatihan kepemimpinan/



Diklatpim IV tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam penilaian unsur kompetensi, sehingga menyebabkan nilai unsur kompetensi mengalami penurunan.

Sedangkan pada unsur kinerja disebabkan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya terdapat perubahan terhadap format Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menyebabkan terkendalanya proses penetapan kinerja dan pengisian capaian kinerja pada SKP pegawai. Hal ini menyebabkan penilaian pada unsur Kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2021) dengan indeks 21,52 dan pada tahun 2022 menurun pada indeks 11,43.

14. Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten

Berdasarkan data realisasi indikator Sasaran Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap sebesar 67,10%, target tahun 2022 sebesar 67 % dengan capaian 100,15%.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya ruas jalan antara lain dengan mengidentifikasi kondisi ruas jalan dengan melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan secara berkala melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.



15. Meningkatnya Kualitas Jalan pada Status Ruas Jalan Desa

Berdasarkan data realisasi indicator Sasaran Persentase Panjang Jalan pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap sebesar 29,79 %, target tahun 2022 sebesar 60 % dengan capaian 49,65%.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya ruas jalan Desa antara lain dengan mengidentifikasi kondisi ruas jalan Desa dengan melakukan rekonstruksi dan pemeliharaan secara berkala melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja salah satunya adalah adanya perbedaan data awal yang di jadikan dasar penetapan target 2022, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan survey ulang terhadap kondis jalan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR dan diperoleh hasil kondisi jalan Desa yang sangat jauh dari target tahun 2022 sehingga sebagai rekomendasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja untuk tahun selanjutnya.

16. Meningkatnya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten

Berdasarkan data realisasi indicator sasaran Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten sebesar 0 % dan target tahun 2022 sebesar 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa tahun 2022 tidak terdapat Bencana Kabupaten yang menyebabkan kerusakan terhadap rumah masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban Bencana.



17. Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani

Berdasarkan data Realisasi indicator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani sebesar 3,78 % dan target tahun 2022 sebesar 43, 85% dengan capaian 8,62 %.

Indeks kepuasan layanan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan ditentukan berdasarkan pada 6 (enam) unsur, yaitu: (1) ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori, (2) ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (MCK), (3) kondisi pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), (4) kondisi prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R), (5) kondisi jalan lingkungan, dan (6) ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik).

Berdasarkan data Kawasan kumuh Kabupaten Kapuas Hulu terdapat luas Kawasan kumuh Kabupaten sebesar 359,46 yang tersebar di beberapa Kawasan desa. Untuk Persentase rata-rata kekumuhan sektoral sesuai dengan SK Bupati sebesar 42,02 dan persentase kontribusi penanganan tahun 202 sebesar 2,09 % dengan persentase Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 0.04 % atau seluas 13,60 Ha.

Kontribusi penanganan tahun 2022 masih jauh dari target yang direncanakan tahun 2022 sebesar 43,85%. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya penanganan antara lain dikarenakan keterbatasan Sumber daya. Sebagai rekomendasi terhadap upaya pencapaian target tahun selanjutnya antara lain dengan melakukan koordinasi lebih intens dengan stakeholder dan lintas sector, sehingga terdapat kolaborasi dan bersinergi dalam menangani Kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas Hulu.



18. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

Berdasarkan data realisasi indikator sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten sebesar 69,20% dan target tahun 2022 sebesar 61,10% dengan capaian sebesar 113,26%. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab kita dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten. Melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi ketersediaan trayek angkutan jalan dan lintas penyeberangan. Untuk trayek angkutan jalan yang tersedia masih belum terpenuhi secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan, namun untuk Lintas penyeberangan sudah dapat terpenuhi/terlayani sesuai dengan kebutuhan. Untuk memastikan terselenggaranya fasilitasi layanan trayek, khususnya pada lintas penyeberangan, telah dilakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan swasta yang menjadi mitra dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten. Sebagai rekomendasi kedepan, akan dilakukan Langkah-langkah strategis dalam mengupayakan pemenuhan dan pelayanan trayek angkutan jalan yang belum tersedia.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada daerah/kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak mendapatkan Tugas Pembantuan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah berupa pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022. DAK tersebut digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 75.748.773.102,00 untuk DAK Fisik sedangkan 81.034.877.955,00 merupakan DAK Non Fisik.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang pendidikan terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persentase jumlah anak Usia 5 sampai 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100 %
2.	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
3.	Pendidikan Kesetaraan	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	100

4.1.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Komponen	Volume	Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persentase jumlah anak Usia 5 sampai 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	4.675	48.897%
			jumlah penduduk usia 5-6 tahun Kabupaten /Kota	9.561	
2.	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	persentase jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	25.029	84,795%
			jumlah penduduk usia 7-12 tahun Kabupaten /Kota	29.517	
3.	Pendidikan Kesetaraan	persentase Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	646	1.152%
			jumlah penduduk usia 7-18 tahun Kabupaten /Kota	56093	



Dari tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2022 Capaian Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 48.897%. Hal ini disebabkan karena data anak usia dini yang sudah tamat dan sedang belajar pada PAUD yang diselenggarakan dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Pada tahun 2022 Capaian Pelayanan Pendidikan Dasar adalah sebesar 84.795%. Hal ini disebabkan karena tidak semua siswa SD yang sudah tamat SD melanjutkan pendidikannya ke SMP.
- c. Pada tahun 2022 Capaian Pelayanan Pendidikan Kesetaraan adalah sebesar 1.152%. Hal ini disebabkan karena pendidikan kesetaraan belum menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, mengingat wilayah yang sangat luas.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Untuk mendukung upaya pemenuhan SPM, pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Pendidikan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.135.671.164,00	82.153.565.260,88	94,28



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.869.800.356,00	2.450.278.766,00	85,38
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	259.312.950,00	203.762.000,00	78,58
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.984.500.000,00	2.635.718.600,00	88,31
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.168.048.470,00	2.121.130.089,00	97,84
5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.654.811.400,00	2.546.651.084,00	95,93
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.058.237.197,00	2.056.770.146,00	99,93
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000,00	149.714.626,00	99,81
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	81.500.000,00	81.255.294,00	99,70
9	Pengadaan Mebel Sekolah	310.000.000,00	309.716.550,00	99,91
10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.153.200.000,00	1.152.043.600,00	99,90
11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	106.029.400,00	104.847.400,00	98,89
12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	252.709.400,00	251.555.300,00	99,54
13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.294.085.500,00	7.280.553.500,00	99,81
14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.025.410.900,00	1.024.286.884,00	99,89
15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.760.000,00	118.625.000,00	99,89
16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32.596.466.694,00	32.376.892.671,78	99,33



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
17	Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	199.375.100,00	99,69
18	Pembangunan Laboratorium	1.445.574.500,00	1.328.385.000,00	91,89
19	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	981.268.500,00	923.529.900,00	94,12
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	199.000.725,00	198.547.441,00	99,77
21	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	545.000.000,00	544.999.950,00	100,00
22	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	52.361.400,00	50.348.000,00	96,15
23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	223.366.000,00	221.220.800,00	99,04
24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56.958.000,00	56.933.000,00	99,96
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	48.008.000,00	47.963.000,00	99,91
25	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.256.218.000,00	5.256.217.600,00	100,00
27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	229.457.600,00	228.699.000,00	99,67
28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	109.140.000,00	107.810.000,00	98,78
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	101.240.000,00	101.130.000,00	99,89
30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.181.760.372,00	16.145.720.359,10	99,78



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
31	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	414.854.000,00	413.720.400,00	99,73
32	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	75.250.000,00	74.972.900,00	99,63
33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	787.958.000,00	780.384.000,00	99,04
34	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	123.832.000,00	123.238.100,00	99,52
35	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.076.500.000,00	-	-
36	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	168.616.000,00	167.859.200,00	99,55
37	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	129.380.800,00	128.410.600,00	99,25
38	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	135.565.000,00	132.210.000,00	97,53
39	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	58.090.000,00	58.089.400,00	100,00
40	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	453.400.000,00	-	-
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	37.631.200,00	31.823.200,00	84,57
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	37.631.200,00	31.823.200,00	84,57
III.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	330.427.000,00	320.662.400,00	97,04



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	274.346.600,00	264.592.600,00	96,44
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	56.080.400,00	56.069.800,00	99,98

4.1.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur baik PNS maupun tenaga kontrak sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Data Personil SPM Bidang Pendidikan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	GURU	
	a. TK/PAUD	973 `orang
	b. SD	2898 orang
	c. SMP	1235 orang
2	a.KESETARAAN	100 orang
3	PENGAWAS	38 orang
4	PENILIK	1 orang
5	TENAGA KEPENDIDIKAN/PENUNJANG	294 orang
6	PEJABAT STRUKTURAL	9 orang
7	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	5 orang
8	JABATAN FUNGSIONAL	9 orang
JUMLAH		5.562 orang



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu cukup luas dan memiliki 23 Kecamatan.
- b. Secara akses infrastruktur jalan masih minim dan masih ada wilayah yang belum terakses oleh jalan yang baik.
- c. Sumber dana pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemampuan keuangan bersumber dari APBD belum dapat secara optimal / terbatas
- d. Sumber daya aparatur terbatas.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya dana dan SDM.
- b. Meningkatkan sarana infrastruktur.
- c. Program berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- d. Sistem rekrutmen pegawai khususnya guru/pendidik minimal pendidikan S-1/ D-4.
- e. Penguatan sistem pengendalian, pengawasan di satuan pendidikan melalui petugas pengawas / penilik.



4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Standar Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang kesehatan terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil,
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin,
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
- d. pelayanan kesehatan balita,
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif,
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).



4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Target dan Indikator SPM Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
11	Pelayanan Kesehatan	Persentase penderita TB yang	100%



NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target
	Orang dengan TB	mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%

4.2.2. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Capaian SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kab./ kota dalam kurun waktu satu tahun	3.046	55.021%
			Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kab.kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	5.536	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jml Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja kab./ kota dlm kurun waktu satu tahun	3.475	65.752%
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.285	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dg	3.566	70.852%



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
			standar dlm kurun waktu satu tahun		
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	5.033	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita usia 0-5 bulan yg mendapat-kan pelayanan kese-hatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun	14.375	65.080%
			Jumlah orang usia 0-5 tahun yang ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	22.088	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan pelaya-nan kesehatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun ajaran	37.691	95.035%
			Jumlah orang usia 7-15 tahun yang ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yg sama	39.660	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yg men-dapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun	161.271	95.956%
			Jumlah orang usia 15-59 th yg ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	168.067	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelaya-nan skrining kesehat-an sesuai standar minimal satu kali di wil. kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun	16.229	76.552%



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
			Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang ada di wil.kerja kab./ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	21.200	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas di wil. kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dlm kurun waktu satu tahun	44.326	65.055%
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang berada di dlm wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/ kota dalam waktu satu tahun yang sama	68.136	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase jumlah penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas di wil. kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.047	100%
			Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.047	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ODGJ berat di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	532	99.254%



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
			Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun yang sama	536	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.342 3.342	100,00%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wil.kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun	6.558 6.609	99.228%

- a. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah sebesar 55.021%, tidak optimalnya capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disebabkan karena sasaran ibu hamil ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil ibu hamil pada tahun 2022.
- b. Capaian pelayanan kesehatan Ibu Bersalin adalah sebesar 65.752%, tidak optimalnya capaian ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disebabkan karena sasaran ibu bersalin ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari BPS, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil ibu bersalin pada tahun 2022.



- c. Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah sebesar 70.852%. Hal ini disebabkan karena sasaran bayi baru lahir ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari BPS, mendekati data riil jumlah bayi baru lahir tahun 2022.
- d. Capaian pelayanan kesehatan balita adalah sebesar 65.080%, tidak optimalnya pelayanan kesehatan balita disebabkan karena sebagian besar balita tidak datang lagi ke posyandu/fasilitas kesehatan setelah berusia 12 bulan
- e. Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 95.956% pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi disebabkan mulai aktifnya kembali proses belajar mengajar bagi anak-anak usia sekolah.
- f. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah sebesar 95.956%, disebabkan meningkatnya kesadaran penduduk usia produktif melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan dan sasaran penduduk usia produktif ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data proyeksi dari BPS.
- g. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 76.552%, sasaran penduduk usia lanjut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan data proyeksi dari BPS.
- h. Capaian pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah sebesar 65.055%, tidak optimalnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi ini disebabkan karena sasaran penderita hipertensi ini ditetapkan berdasarkan angka prevalensi yang diperoleh dari hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun sebelumnya, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil penderita hipertensi pada tahun 2022.



- i. Capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM) adalah sebesar 100%, ini berarti seluruh penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- j. Capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah sebesar 99.254%, hampir semua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sudah mendapatkan pelayanan kesehatan.
- k. Capaian pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC) adalah sebesar 100%, semua orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- l. Capaian pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah sebesar 99.228%, hal ini karena tidak seluruh orang dengan resiko terinfeksi HIV dapat ditemukan dan melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Kesehatan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :



Tabel 4.7.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Kesehatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.608.113.057,00	56.966.765.630,67	85,53
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	7.980.547.923,00	7.701.745.458,00	96,51
2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	370.212.500,00	369.812.500,00	99,89
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	704.175.000,00	703.647.435,00	99,93
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.368.425.000,00	1.368.149.750,00	99,98
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	467.775.000,00	467.610.000,00	99,96
6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.105.086.500,00	1.099.070.104,00	99,46
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	574.811.448,00	562.070.409,00	97,78
8	Pengadaan Obat, Vaksin	3.190.531.094,00	2.929.472.338,00	91,82
9	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.261.560.611,00	1.257.777.300,00	99,70
10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	77.035.732,00	75.267.356,00	97,70
11	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	56.550.000,00	56.550.000,00	100,00



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
12	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	402.735.400,00	402.047.458,00	99,83
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.727.969.600,00	1.551.226.577,00	89,77
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.746.972.600,00	1.333.696.450,00	76,34
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	46.660.000,00	11.580.000,00	24,82
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	313.302.000,00	291.664.000,00	93,09
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.325.879.030,00	1.150.164.600,00	86,75
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	141.284.500,00	141.070.000,00	99,85
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	403.143.770,00	312.476.950,00	77,51
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.601.600.000,00	795.572.500,00	49,67
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	198.610.000,00	155.920.000,00	78,51
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	461.564.507,00	391.470.000,00	84,81
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	342.853.200,00	270.927.200,00	79,02



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.650.577.658,00	780.515.800,00	47,29
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.407.589.100,00	3.136.055.470,00	92,03
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.032.792.520,00	949.271.800,00	91,91
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.509.913.070,00	1.767.610.400,00	70,43
28	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.215.202.290,00	1.151.654.275,00	94,77
29	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	921.719.610,00	590.076.100,00	64,02
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	232.844.830,00	185.759.800,00	79,78
31	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.653.244.000,00	1.540.266.300,00	93,17
32	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.081.621.800,00	5.496.328.200,00	90,38
33	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.880.767.549,00	7.623.421.902,67	96,73
34	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	132.724.000,00	30.914.000,00	23,29
35	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.255.098.350,00	1.163.803.244,00	92,73
36	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.833.214.000,00	2.769.233.255,00	97,74
37	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.590.177.700,00	2.186.087.771,00	84,40
38	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.039.562.365,00	3.299.783.014,00	65,48



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
39	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.340.440.000,00	-	-
40	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	190.870.000,00	135.842.000,00	71,17
41	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
42	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	233.817.800,00	232.291.271,00	99,35
43	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	104.689.000,00	103.768.643,00	99,12
44	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.957.000,00	99.765.000,00	94,16
45	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	324.505.000,00	323.829.000,00	99,79
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	25.919.874.000,00	25.486.308.080,00	98,33
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	26.205.000,00	26.000.000,00	99,22
2	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	118.044.000,00	115.841.000,00	98,13
3	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	25.269.600.000,00	24.872.276.000,00	98,43
4	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	239.381.000,00	238.604.500,00	99,68
5	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	266.644.000,00	233.586.580,00	87,60



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
	Kabupaten/Kota			
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	60.422.800,00	55.595.762,00	92,01
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13.845.000,00	13.816.082,00	99,79
2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.065.000,00	6.690.000,00	94,69
3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	15.600.000,00	14.294.080,00	91,63
4	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	7.400.000,00	4.650.000,00	62,84
5	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	16.512.800,00	16.145.600,00	97,78
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.600.000,00	55.591.250,00	96,51



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	57.600.000,00	55.591.250,00	96,51

4.2.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.8.
Data Personil SPM Bidang Kesehatan

NO.	JENIS TENAGA	PNS	KONTRAK	NS	MAGANG	JUMLAH
1.	DOKTER UMUM	28	29	1	0	58
2.	DOKTER GIGI	2	2	0	0	4
3.	DOKTER SPESIALIS	5	5	0	0	10
4.	PERAWAT	304	291	13	105	713
5.	PERAWAT GIGI	27	5	0	10	42
6.	BIDAN	223	133	22	80	458
7.	PRANATA LABORATORIUM	32	14	3	1	50
8.	FARMASI	30	15	3	0	48
9.	PEREKAM MEDIS	2	10	0	2	14
10.	PENYULUH KESMAS	28	27	4	6	65
11.	APOTEKER	10	9	2	1	22
12.	FISIOTERAPIS	4	2	0	0	6
13.	NUTRISIONIS	33	11	14	1	59
14.	RADIOGRAFER	4	4	0	0	8
15.	SANITARIAN	19	3	7	1	30
16.	TENAGA LAINNYA	110	184	0	9	303
17.	ELEKTROMEDIS	1	0	0	0	1



NO.	JENIS TENAGA	PNS	KONTRAK	NS	MAGANG	JUMLAH
	JUMLAH	862	744	69	216	1891

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan antara data proyeksi dan data riil yang besar.
2. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
3. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.
4. Pencatatan dan laporan yang belum tertib.
5. Perekrutan SDM belum menyesuaikan kebutuhan terkait Kompetensi Peningkatan SPM.
6. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan.
7. Evaluasi SPM belum terintegrasi secara optimal.
8. Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna. dan Sarana dan prasarana kesehatan dasar yang belum merata.
9. Sosialisasi Informasi Program dan Hasil Kegiatan yang belum maksimal.
10. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
11. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (new emerging dan re- emerging).
12. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih tidak optimal di masyarakat.



13. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.
14. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berimbas pada berbagai hal diantaranya :
 - a) Monitoring dan evaluasi tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang sdh dibuat, Monev dengan metode virtual tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.
 - b) masyarakat yang takut mendatangi atau mengunjungi Fasilitas kesehatan sehingga terjadi keterlambatan penanganan komplikasi pada ibu maupun bayi.
 - c) beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
 - d) *refocussing* anggaran difokuskan untuk penanganan covid – 19
 - e) Penajaringan dan pelayanan kesehatan tidak bias dilaksanakan secara optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*);
- b. Peningkatan dan Pemerataan SDM, diutamakan untuk ketersediaan 6 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga dokter, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan.
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan masyarakat, dan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
- d. Efisiensi pembiayaan, Pembiayaan diarahkan untuk memperkuat



- pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien.
- e. Pengembangan sistem informasi kesehatan, diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
 - f. Penguatan pelayanan kesehatan sekunder (rujukan).
 - g. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum of Care*), melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
 - h. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan, melalui program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil.
 - i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara berkelanjutan untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta dan pemberdayaan di masyarakat.
 - j. Peningkatan Inovasi dalam pelayanan.
 - k. Penjaringan dan pelayanan di masa pandemi berpedoman pada protokol kesehatan serta petunjuk teknis yang berlaku.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang Pekerjaan umum terdiri atas :



- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Target dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten/Kota	100 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %

4.3.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :



Tabel 4.12.
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten	48.592	56.729%
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut	85.656	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air limbah domestik di dlm sebuah kab.	39.170	45.729%
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut	85.656	

4.3.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :



Tabel 4.13
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.035.553.744,00	3.643.187.336,74	90,28
1	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	134.953.000,00	134.953.000,00	100
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.900.600.744,00	3.508.234.336,74	89,94
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	19.835.007.800,00	19.733.098.750,00	99,49
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	438.206.000,00	420.009.550,00	95,85
2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	40.000.000,00	39.960.000,00	99,90
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan	829.330.000,00	819.585.000,00	98,82
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan	1.212.553.000,00	1.211.180.950,00	99,89
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	96.575.000,00	96.254.150,00	99,67
6	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan	9.397.514.000,00	9.325.311.650,00	99,23
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Perdesaan	7.820.829.800,00	7.820.797.450,00	99,99
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.328.058.200,00	1.327.224.500,00	99,94



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.328.058.200,00	1.327.224.500,00	99,94
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	122.890.000,00	119.604.150,00	97,33
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	46.470.000,00	43.518.050,00	93,65
2	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	76.420.000,00	76.086.100,00	99,56
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	774.480.390,00	729.575.390,00	94,20
1	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	774.480.390,00	729.575.390,00	94,20
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	64.926.142.646,00	64.365.316.011,45	99,14
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	108.928.000,00	76.628.000,00	70,35
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	64.216.414.646,00	63.689.838.011,45	99,18
3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	600.800.000,00	598.850.000,00	99,68
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	27.335.910.714,00	26.731.088.399,68	97,79
1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.252.704.560,00	1.222.636.450,00	97,60



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	25.033.206.154,00	24.459.081.209,68	97,71
3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.050.000.000,00	1.049.370.740,00	99,94
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	109.557.071.187,00	105.600.703.036,00	96,39
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.541.774.460,00	1.541.774.460,00	100
2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	836.940.000,00	836.940.000,00	100
3	Rekonstruksi Jalan	81.794.430.656,00	79.018.363.982,00	96,61
4	Pemeliharaan Berkala Jalan	8.909.062.276,00	8.906.890.142,00	99,98
5	Pembangunan Jembatan	8.060.574.000,00	7.216.300.287,00	89,53
6	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	5.634.058.535,00	5.582.693.850,00	99,09
7	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.780.231.260,00	2.497.740.315,00	89,84
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	970.238.387,00	877.853.600,00	90,48
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	117.025.000,00	106.586.000,00	91,08
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	1.880.000,00	-	-
3	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	8.400.000,00	3.500.000,00	41,67
4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	46.740.000,00	42.420.000,00	90,76
5	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	271.900.000,00	254.871.000,00	93,74



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
6	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	524.293.387,00	470.476.600,00	89,74
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	989.778.000,00	969.856.345,00	97,99
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	116.669.000,00	115.638.040,00	99,12
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	204.300.000,00	203.895.205,00	99,80
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	290.445.000,00	275.127.300,00	94,73
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	151.089.000,00	148.161.000,00	98,06
5	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	227.275.000,00	227.034.800,00	99,89

4.3.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut nama jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.14
Data Personil SPM Pekerjaan Umum

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0
3.	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan	1
4.	Kepala Bidang Bina Marga	1



5.	Kepala Bidang Tata Ruang	1
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1
7.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	1
8.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	1
9.	Kepala Subbagian Program	1
10.	Kepala Subbagian Umum dan Aparatur	1
10.	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah I	2
9.	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakayaan	1
10.	Jabatan Fungsional Tertentu	38
11.	Jabatan Fungsional Umum	31
JUMLAH		81

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat yang menggunakan perpipaan serta Kurangnya respon masyarakat untuk memelihara Sarana Air bersih yang ada bahkan Sering diabaikan pentingnya peran kebersihan
- b. Masih ada masyarakat yang menolak pembangunan Sanitasi (IPAL) karena ketidaktahuan fungsinya bahkan Adanya keberatan atas pembangunan yang harus melewati tanah masyarakat.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :



- a. Adanya pembinaan dan sosialisasi dari Dinas terkait pemeliharaan saran dan prasarana air bersih.
- b. Adanya pembinaan dan sosialisasi dari terkait pemeliharaan saran dan prasarana sanitasi.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa SPM bidang perumahan rakyat terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena rekolasi program.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Target dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan	100%



	korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.16.
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah rumah korban bencana yg di tangani sesuai standar di wil. kerja Kab./Kota dlm kurun waktu 1 tahun	0	0%
			Jumlah total rencana rumah korban yang akan ditangani di wil. kerja dlm Kab./Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	0	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah total rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah atau bangunan	0	0%
			rumah tangga penerima subsidi uang sewa	0	
			rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	



Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebesar 0 %, Capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat warga masyarakat yang harus direlokasi sebagai akibat adanya program pemerintah yang harus dilakukan di lokasi pemukiman, sehingga capaian target kinerja layanan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat dipenuhi.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.17.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	350.072.500,00	348.923.044,00	99,67
1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	302.692.000,00	302.585.700,00	99,96



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	47.380.500,00	46.337.344,00	97,80
II	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	695.297.700,00	693.712.773,00	99,77
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	294.285.000,00	293.515.123,00	99,74
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	401.012.700,00	400.197.650,00	99,80

4.4.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.18.

Data Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	3
4.	Pelaksana	11
JUMLAH		16



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
- b. Capaian SPM Bidang Perumahan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kemampuan anggaran yang terbatas dibandingkan dengan pemenuhan capaian SPMnya, disamping itu di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat kegiatan pembangunan dengan konsekuensi relokasi warga, mengingat lahan yang masih cukup luas untuk kegiatan pembangunan.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Perlu adanya dukungan anggaran yang berasal dari APBD khususnya APBN;
- b. Perlunya bimbingan teknis (BIMTEK) untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota;

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;



- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat,
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :



Tabel 4.19.
Target dan Indikator SPM
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.20.
Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0%
			Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	10	



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
			pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkara		
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	266.651	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya mendapatkan layanan informasi rawan bencana	266.651	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.012	0.38%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	266.651	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	85.482	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	85.482	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	29	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam 1 (satu) tahun	29	



Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Capaian layanan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah sebesar 0%, hal ini karena pada proses penertiban dan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), dilakukan pendekatan persuasif dan komunikatif terlebih dahulu kepada warga yang rawan terkena dampak sehingga bisa mengurangi kerugian baik secara riil dan materiil dari tindakan penegakan perda tersebut dengan demikian bersarkan hasil mufakat yang baik antara warga maupun anggota yang bertugas di lapangan bisa saling terjaga keharmonisan, keamanan dan ketertiban secara hukum dari penegakan perda dan sebaliknya dari hal-hal yang merugikan warga.

Untuk capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2022 hanya dapat dicapai sebesar 0,38 % dikarenakan beberapa hal diantaranya keadaan geografis kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan daerah banjir menyebabkan bagi warga Kapuas Hulu banjir bukan dianggap bencana, tidak semua warga terdampak banjir , dan anggaran untuk kegiatan pencapaian target di anggap kurang memadai.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :



Tabel 4.21.

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
SPM Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	6
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.095.802.331,00	1.080.758.900,00	98,63
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	785.790.981,00	776.434.100,00	98,81
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35.204.810,00	32.712.000,00	92,92
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	128.295.200,00	127.667.000,00	99,51
4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	88.522.500,00	88.522.500,00	100,00
5	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	2.200.000,00	-	-
6	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	46.908.240,00	46.734.300,00	99,63



No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
7	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.880.600,00	8.689.000,00	97,84
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	149.999.150,00	148.161.600,00	98,77
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	29.989.000,00	29.941.200,00	99,84
2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	59.684.400,00	58.067.100,00	97,29
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60.325.750,00	60.153.300,00	99,71
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	538.643.600,00	536.931.550,00	99,68
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.539.000,00	106.539.000,00	100,00
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	162.170.600,00	161.542.600,00	99,61
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	30.000.000,00	29.637.000,00	98,79
4	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	239.934.000,00	239.212.950,00	99,70



4.5.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan dalam jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.22.

Data Personil SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	1
3.	Kepala Bidang Penegakan Operasi	1
4.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi	1
5.	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	1
6.	Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan	1
7.	Bidang Perlindungan Masyarakat	1
8.	Fungsional Tertentu	29
9.	Fungsional Umum	13
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
13.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
14.	Kepala Sub Bag. Umum dan Aparatur	1
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
16.	Jabatan Fungsional Umum	17
17.	Jabatan fungsional tertentu	5
18.	Tenaga kontrak BPBD	18
JUMLAH		93



4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum adanya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.
- d. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- e. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.
- f. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana.
- g. Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana.
- i. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :



- a. Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.
- b. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
- c. Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
- f. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.



4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa SPM bidang Sosial terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, serta
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :



Tabel 4.23.

Target dan Indikator SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	100%

4.6.3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.24.

Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah WN penyandang disabilitas yg memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dalam 1 tahun	1	100%



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
			Jumlah WN penyandang disabilitas skala Kab. dalam 1 tahun yg seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi di luar panti	1	
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Jumlah anak terlantar yg memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah anak terlantar skala Kab. dalam 1 tahun yang seharusnya mendapatkan layanan sosial diluar panti	0	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah lanjut usia terlantar yg seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 tahun	0	
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah gelandangan dan pengemis yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam 1 tahun	0	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	83.357	100%
			Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang seharusnya menerima bantuan	83.357	



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
			sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun		

Berdasarkan dari tabel diatas, bahwa pelayanan dasar di bidang urusan sosial yaitu :

1. Pelayanan dasar untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti belum sesuai target yang telah di tentukan, hal ini karena tidak terdapat penyandang disabilitas terlantar di kabupaten kapuas Hulu
2. Pelayanan dasar untuk rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti dan pelayanan dasar untuk rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti tidak terdapatnya anak terlantar, gelandangan ataupun pengemis di daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pelayanan dasar untuk Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti tidak sesuai target dikarenakan tidak ada lanjut usia terlantar di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Pelayanan dasar untuk Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana sudah mencapai sesuai target 100%.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Sosial sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :



Tabel 4.25

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan SPM Bidang Sosial

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Anggaran	Realisasi	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.080.254.520,00	6.029.098.383,00	99,16
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	165.600.000,00	165.600.000,00	100,00
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	165.600.000,00	165.600.000,00	100,00
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	149.908.400,00	146.251.583,00	97,56
1	Pemberian Layanan Rujukan	149.908.400,00	146.251.583,00	97,56
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.635.076.520,00	5.587.953.150,00	99,16
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.055.275.720,00	4.012.208.100,00	98,94
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.579.800.800,00	1.575.745.050,00	99,74
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	93.809.600,00	93.433.650,00	99,60
1	Pelayanan Dukungan Psikososial	29.853.600,00	29.477.650,00	98,74
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	63.956.000,00	63.956.000,00	100,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35.860.000,00	35.860.000,00	100,00
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.860.000,00	35.860.000,00	100,00



4.6.5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan berdasarkan jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.26.

Data Personil SPM Bidang Sosial

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1
2.	Kepala Bidang Sosial	1
3.	Fungsional tertentu	2
4.	Fungsional Umum	5
JUMLAH		9

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
2. Tidak ada Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan gepeng di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian



Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
2. meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS, TKSK, PKH dan Organisasi Sosial Lainnya untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
4. Memberikan pelayanan rehabilitasi Sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas yang miskin dan kurang mampu Di luar panti.



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 merupakan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memuat capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :

1. pelaksanaan urusan konkuren di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.
2. pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, transmigrasi
3. pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari unsur penunjang perencanaan dan



keuangan, manajemen keuangan, pengadaan, kepegawaian serta transparansi publik.

Selain memuat capaian kinerja urusan pemerintahan sebagaimana disampaikan diatas, LPPD Kabupaten Kapuas Hulu juga memuat Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang menggambarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada masing-masing sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi SPM 6 (enam) bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Sosial serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan Pemerintahan masih bertahap bangkit kembali dengan tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Penyelenggaraan pemerintahan tersebut juga tentunya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha yang tidak dapat dilepaskan dari itikad baik, kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan urusannya masing-masing, khususnya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu lainnya.

Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Hasil (Outcome) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah dicapai pada tahun 2022 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan pada tahun-tahun sebelumnya mengingat masih terdapat kinerja yang belum memenuhi harapan yang disebabkan oleh berbagai macam kendala dan keterbatasan.



Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan capaian kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Tahun 2021-2026. Capaian kinerja IKU pada tahun 2021 akan menjadi umpan balik dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga RPJMD yang akan disusun nantinya dapat menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan pada akhirnya akan dapat menunjang peningkatan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Capaian kinerja yang masih rendah pada Indikator Kinerja Keluaran (Output), Indikator Kinerja Hasil (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama yang disebabkan karena masih terdapat kekurangan, kelemahan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022. Terhadap hal tersebut akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Diharapkan pada proses evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT).

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	$\frac{4,675}{9,561} \times 100 = 48.897\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			
		2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	$\frac{25,029}{29,517} \times 100 = 84.795\%$		
			jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			
		3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	$\frac{13,177}{14,864} \times 100 = 88.650\%$		
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			
		4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	$\frac{646}{13,152} \times 100 = 4.912\%$		
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
2	Kesehatan	1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk kabupaten}} \times 100$	$\frac{242 \times 1000}{266,651} \times 100$ 90.755%	Dinas Kesehatan	
		2 Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten yang Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3}{3} \times 100$ 100.000%		
		3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3,046}{5,536} \times 100$ 55.022%		
		4 Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar}}{\text{Jumlah Ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3,475}{5,285} \times 100$ 65.752%		
		5 Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah bayi baru lahir di kabupaten}} \times 100$	$\frac{3,566}{5,033} \times 100$ 70.852%		
		6 Cakupan Pelayanan kesehatan Balita Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah balita di kabupaten}} \times 100$	$\frac{14,375}{22,088} \times 100$ 65.081%		
		7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten}} \times 100$	$\frac{37,691}{39,660} \times 100$ 95.035%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		8 Persentase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten}} \times 100$	$\frac{161,271}{168,067} \times 100 = 95.956\%$		
		9 Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah warga negara usai 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah orang warga negara 60 tahun ke atas di kabupaten}} \times 100$	$\frac{16,229}{21,200} \times 100 = 76.552\%$		
		10 Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah penderita hipertensi di kabupaten}} \times 100$	$\frac{44,326}{68,136} \times 100 = 65.055\%$		
		11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3,047}{3,047} \times 100 = 100.000\%$		
		12 persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah penderita ODGJ berat di kabupaten}} \times 100$	$\frac{532}{536} \times 100 = 99.254\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3,342}{3,342} \times 100 = 100.000\%$		
		14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{6,558}{6,609} \times 100 = 99.228\%$		
		1 Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)}}{\text{Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.000\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air	
		2 Rasio Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten (m)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kabupaten (m)}} \times 100$	$\frac{5.95}{45.31} \times 100 = 13.132\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		3 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha) direhabilitasi (ha) dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting x 100	4457.00 X 100 6166.00	72.283%	
			Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten			
		4 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten x 100	48592.00 X 100 85656.00	56.729%	
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten			
		5 Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD x 100	39170.00 X 100 85656.00	45.729%	
			jumlah rumah di Kabupaten			
		6 Rasio Kepatuhan IMB	Jumlah Pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya x 100	5785.00 X 100 5785.00	100.000%	
			Jumlah IMB yang berlaku			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		7 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang mantap	$\frac{742225.00}{1106148.00} \times 100$ 67.100%		
			Jumlah Panjang jalan Keseluruhan di Wilayah Kabupaten			
		8 Rasio tenaga Operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator teknis/analisis	$\frac{41.00}{41.00} \times 100$ 100.000%		
			jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten			
		9 Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyeksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	$\frac{39.00}{44.00} \times 100$ 88.636%		
			jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
4	Perumahan Rakyat	1 Hunian Untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022	$\frac{0.00}{0.00} \times 100$ 0.000%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya	
			jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		2 Fasilitas Hunian Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni $\frac{\text{jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintahan daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}{\text{jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintahan daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100$	$\frac{0.00}{0.00} \times 100 = 0.000\%$		
		3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten}} \times 100$	$\frac{13.60}{359.46} \times 100 = 3.783\%$		
		4 Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{jumlah total unit rumah kabupaten}} \times 100$	$\frac{18652.00}{59173.00} \times 100 = 31.521\%$		
		5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{\text{jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{jumlah unit rumah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{438.00}{59173.00} \times 100 = 0.740\%$		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$	$\frac{33}{33} \times 100 = 100.000\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	
		2 Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	$\frac{\text{jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan PERDA dan PERKADA yang memuat sanksi}} \times 100$	$\frac{6}{6} \times 100 = 100.000\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	266,651	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,012		
		5 jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	85,482		
		6 persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh perangkat daerah pemadam kebakaran dan penyelamatan + jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan perangkat daerah pemadam kebakaran dan penyelamatan jumlah kebakaran di kabupaten	$\frac{29}{29} \times 100$ 100.000%		
		7 waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran	9,11 menit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
6	Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti x 100	$\frac{1}{1} \times 100$ 100.000%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak terdapat penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis yang terlantar
			populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Kabupaten			
		2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun x 100	$\frac{83,357}{86,718} \times 100$ 96.124%		
			populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
7	Tenaga Kerja	1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD x 100	$\frac{6}{6} \times 100$ 100.000%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten			
		2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi x 100	$\frac{328}{21,375} \times 100$ 1.535%		
			jumlah tenaga kerja keseluruhan			
		3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB per tahun berjalan (atas dasar harga konstan) x 100	$\frac{6,804,580,000,000}{21,275} \times 100$ 31983924794.360%		
			jumlah tenaga kerja			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		4 Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	jumlah perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak x 100 jumlah perusahaan	191 X100 315 60.635%		
		5 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	jumlah pencari kerja yang ditempatkan x 100 jumlah pencari kerja yang terdaftar	165 X100 347 47.550%		
		1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	jumlah ARG pada belanja langsung APBD x 100 jumlah seluruh belanja langsung APBD	69,350,000 X100 642,419,231,940 0.011%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi x 100 jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	11 X100 11 100.000%		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	jumlah perempuan yang mengalami kekerasan x 100 jumlah penduduk perempuan	15 X100.000 129,971 11.541		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
9	Pangan	1 Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras /jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{jumlah cadangan pangan}}{\text{jumlah kebutuhan pangan}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.000\%$	Dinas Pertanian dan Pangan	Belum ada PERDA Cadangan Pangan
10	Pertanahan	1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.000\%$	Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah	
		2 Persentase Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{jumlah kebutuhan tanah untuk fasilitas umum}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.000\%$		
		3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.000\%$		
		4 Tersedianya Tanah Obyek landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100$	$\frac{926}{2,161} \times 100 = 42.851\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		5 Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah			
			$\frac{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}}{\text{Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$	0.000%	
		6 Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani			
			$\frac{\text{jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}}{\text{jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}} \times 100$	$\frac{5}{5} \times 100$	100.000%	
11	Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	IKLH Kab = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	89.18 58.89 89.87	78.07	Dinas Lingkungan Hidup
			Total Volume Sampah yang ditangani			
			$\frac{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten}}{\text{Total Volume Sampah yang ditangani}} \times 100$	$\frac{15,260}{80,295} \times 100$	19.005%	
		3 Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten			
			$\frac{\text{usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}}{\text{Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten}} \times 100$	$\frac{0}{9} \times 100$	0.000%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP x 100 Jumlah penduduk 17 tahun ke atas Kabupaten	$\frac{189,986}{194,049} \times 100$ 97.906%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA x 100 jumlah anak usia 0 - 17 tahun	$\frac{48,639}{72,602} \times 100$ 66.994%		
		3 Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 -18 Tahun yang sudah memiliki akta kelahiran x 100 jumlah anak usia 0 - 18 tahun	$\frac{76,074}{77,390} \times 100$ 98.300%		
		4 Jumlah Perangkat Daerah yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama x 100 Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{11}{50} \times 100$ 22.000%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun x 100 jumlah desa tertinggal per awal tahun 2022	$\frac{9}{27} \times 100$ 33.333%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun x 100 jumlah desa berkembang per awal tahun 2022	$\frac{140}{154} \times 100$ 90.909%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 TFR (angka kelahiran total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran menurut kelompok umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i = 1 untuk kelompok umur 15-19, 1 = 2 untuk kelompok umur 20-24 , i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000	2.33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2 Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	jumlah peserta KB aktif modern $\frac{\text{jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	$\frac{26,185}{39,584} \times 100 = 66.150\%$		
		3 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani $\frac{\text{jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	$\frac{4,913}{41,123} \times 100 = 11.947\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
15	Perhubungan	1 Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ $IK1 (\text{angkutan jalan}) = \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten} \times \text{bobot trayek}}{\text{dibagi jumlah kebutuhan trayek pd kab. tsb}}$ $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yg beroperasi pd kabupaten tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tsb}}$	$(0,56 \times 70) + (1 \times 30)$ 69.20 17X1/30 0.567 6X1/6 1.000	Dinas Perhubungan	
		2 Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C Ratio Jalan Kabupaten	0.450%		
16	Komunikasi dan Informatika	1 persentase perangkat daerah yg terhubung dgn akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	$\frac{1}{50} \times 100$ 2.000%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		2 persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan Publik}} \times 100$	$\frac{2}{14} \times 100$ 14.286%		
		3 persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$	$\frac{235,239}{266,651} \times 100$ 88.220%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 peningkatan koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan aset $\times 100$	$\frac{35}{271} \times 100$	12.915%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			jumlah seluruh koperasi			
		2 meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha $\times 100$	$\frac{2,701}{9,672} \times 100$	27.926%	
			jumlah usaha mikro keseluruhan			
18	Penanaman Modal	1 persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(jumlah investasi tahun 2022 - jumlah investasi tahun 2021) di kabupaten $\times 100$	$\frac{(3.144.000.000.000-69.69,434,000,000)}{69,434,000,000} \times 100$	348.483%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			jumlah investasi tahun 2021 di kabupaten			
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1 tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten $\times 100$	$\frac{103}{66,052} \times 100$	0.156%	
			jumlah pemuda di kabupaten			
		2 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten $\times 100$	$\frac{2,179}{66,052} \times 100$	3.299%	
			jumlah pemuda di kabupaten			
20	Statistik	3 peningkatan prestasi olahraga	jumlah perolehan medali pada even olahraga nasional dan internasional	27		
20	Statistik	1 persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\times 100$	$\frac{50}{50} \times 100$	100.000%	
			Jumlah Perangkat Daerah	50		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		2 persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	$\frac{50}{50} \times 100 = 100.000\%$		
21	Persandian	1 tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{jumlah area penilaian}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.000\%$	Dins Kominfo	
22	Kebudayaan	1 tingkat pelestarian cagar budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100$	$\frac{13}{13} \times 100 = 100.000\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1 nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	38.17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2 indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat $= \frac{\sum UPLM}{\sum ALM} \times 100$	34.63		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
24	Kearsipan	1 tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75		
		2 tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0.61		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
25	Kelautan dan Perikanan	1 Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	60744.370	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	1 persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	jumlah wisatawan tahun 2022 - jumlah wisatawan tahun 2021 jumlah wisatawan tahun 2021 X 100	(4663-42) x100 42 11002.381%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2 Persentase peningkatan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	jumlah wisatawan tahun 2022 - jumlah wisatawan tahun 2021 jumlah wisatawan tahun 2021 X 100	18308-5485 x100 5485 233.783%		
		3 tingkat hunian akomodasi	jumlah kamar yang terjual jumlah kamar yang tersedia x 100	43278 x100 346020 12.507%		
		4 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten (harga berlaku)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.787%		
		5 kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten (harga berlaku)	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	225.401%		
27	Pertanian	1 produktivitas pertanian per hektar per tahun	jumlah produksi pertanian pangan perhektar per tahun Luas Panen x 100	46,515.96 x100 20,637 225.401%	Dinas Pertanian dan Pangan	
		2 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	jumlah kejadian penyakit tahun 2022 - jumlah kejadian/ kasus penyakit tahun 2021 jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2021 x 100	451-828 x100 828 -45.531%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
28	Perdagangan	1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dgn ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{jumlah pelaku usaha di kabupaten}} \times 100$	$\frac{2701}{9676} \times 100$ 27.914%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2 Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100$	$\frac{196070}{525514} \times 100$ 37.310%		
		3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun 2022}}{\text{Jumlah Potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100$	$\frac{394}{2186} \times 100$ 18.024%		
29	Perindustrian	1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	$\frac{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun 2022- jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021}}{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021}} \times 100$	$\frac{(2630-2495)}{2495} \times 100$ 5.411%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	30%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan x 100 jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{145}{270} \times 100$ 53.704%		
		4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah izin Perluasan industri (IPIU) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan x 100 jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{0}{0} \times 100$ 0.000%		
		5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan x 100 % jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{0}{0} \times 100$ 0.000%		
		6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%), 7-12 bulan (25%), tidak menyampaikan (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%), bahan baku dan bahan penolong (10%)	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
30	Perencanaan dan Keuangan 9,462,994.29 9,462,994,290,000.00	1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Jumlah APBD*	$162,372,714,545.34 \times 100$ 1,676,425,301,707.00 9.686%	Badan Keuangan Daerah	
		2 Rasio PAD	Jumlah PAD Jumlah PDRB Non Migas $\times 100$	$70,355,446,187.97 \times 100$ 1,602,108,166,749.00 4.391%	Badan Keuangan Daerah	
		3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level 2	Inspektorat Kabupaten	
		4 peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level 3	Inspektorat Kabupaten	
		5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures $\times 100$ Jumlah belanja APBD	$891,705,858,795.01 \times 100$ 1,664,425,301,707.00 53.574%	Badan Keuangan Daerah	
		6 Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	2011-2016 (WDP) 2017-2021 (WTP)	Inspektorat Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
31	Pengadaan	1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan x 100 nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
			$\frac{\text{jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022}}{\text{jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022}} \times 100$	0.00 x100 6,162.00 0.000%		
		2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah Pengadaan yang Dilakukan x 100 % Dengan Metode Kompetitif			
			$\frac{\text{Jumlah Pengadaan yang Dilakukan tanpa Metode Kompetitif}}{\text{Jumlah Pengadaan yang Dilakukan tanpa Metode Kompetitif}} \times 100$	84.00 x100 6,078.00 1.382%		
		3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	jumlah nilai belanja langsung yang x 100 melalui pengadaan			
			$\frac{\text{total belanja langsung}}{\text{total belanja langsung}} \times 100$	613,527,920,590.12 x100 623,433,278,590.12 98.411%		
		4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022 - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021 x 100	$\frac{249,863,419,701,45-307,216,020,390,79}{307,216,020,390,79} \times 100$	-18,668%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
32	Kepegawaian	1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	841	x100 165.226%	BKPSDM
			Jumlah seluruh pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	509		
		2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	323	x100 23.926%	BKPSDM
			seluruh jumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1350		
		3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	97	x100 28.783%	BKPSDM
			seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	337		
33	Manajemen Keuangan	1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja	1,607,782,109,868	x100 1.317%	Badan Keuangan Daerah
			total belanja APBD	1,586,875,833,818		
		2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	70,355,446,188	x100 5.920%	Badan Keuangan Daerah
			Total PAD dalam APBD	66,422,936,432		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	RUMUS / PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	SUMBER DATA	KET.
		3 Assets Management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya	Badan Keuangan Daerah	
			Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya		
			Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	ya		
			Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	ya		
		4 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai Realisasi SiLPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100$	$\frac{74,317,134,958.57}{1,805,316,788,090} \times 100 = 4.117\%$		
34	Transparansi dan Partisipasi Publik	1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100$	$\frac{211,113,104,578.40}{354,164,781,625} \times 100 = 59.609\%$		
		2 akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang sudah dirinci}} \times 100$	$\frac{94.00}{159} \times 100 = 59.119\%$		

5784

59173

9.77%

297,439,000,000		
69,434,000,000	694.34	3114
228,005,000,000	1,000,000,000	1000000000
328.38%	694,340,000,000	3,114,000,000,000
	348.483%	



10861	
5485	
5376	98%
189.28	
189,280,000	328
12563	122
8074	1
20637	451
22676.89	120

23839.07

694

46515.96

14

828

A.	BELANJA	1,747,113,931,302.00
B.	BELANJA MODAL	379,557,807,875.00
	BELANJA PEMERINTAHAN UMUM(A-B)	1,367,556,123,427.00
C	BELANJA TRANSFER	
	1. BELANJA HIBAH	86,314,234,840.00

2. BELANJA BANTUAN SOSIAL	5061525000
3. BELANJA TIDAK TERDUA	3000000000
4. BELANJA TRANSFER	3.74273E+11

11071.94

869.87

0.59

870.46

10201.48

10,201,480,000.00

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT) URUSAN WAJIB

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN(OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1.1 Jumlah Satuan pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		144	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
			1.2 Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		3745		
			1.3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		3745		
			1.4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD(Negeri dan Swasta)		390		
			1.5 Jumlah Pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		937		
			1.6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana(S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		204		S1 = 184 D4 = 20
			1.7 Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah		98		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		2 Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	2.1 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		456		
			2.2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		31383		
			2.3 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		14190		
			2.4 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		31383		
			2.5 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		14190		
			2.6 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan Swasta)		3296		
			2.7 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan Swasta)		1315		
			2.8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		1395		
			2.9 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		681		
			2.10 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan swasta)		450		

NO	URUSAN DEMOKRASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.11 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		339		
			2.12 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan swasta)		433		
			2.13 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan swasta)		135		
			2.14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		1141		
			2.15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang ememiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		650		
			2.16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		251		
			2.17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		21		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat		15		guru honor = 179 TAS PNS = 75, TAS Honor = 22
			2.19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat.		0		
		4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		5		
			4.2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		491		
			4.3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		491		
			4.4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		155		
			4.5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		100		
			4.6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) dan Sarjana (S1)		66		
			4.7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		251		

NO	URUSAN DEMOKRASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			4.8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 .				
2	Kesehatan	1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	1.1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		2	Dinas Kesehatan	
		2 Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	2.1. Jumlah RS dibina dan dipesiapkan akreditasinya		3		
		3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	3.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		460,253		
			3.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		646		
		4 Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	4.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		36752		
			4.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		646		
		5 Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		26387		
			5.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		646		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		6 Cakupan Pelayanan kesehatan Balita Sesuai Standar	6.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		189260		
			6.2. Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		774		
		7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		92350		
			7.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		705		
		8 Persentase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	8.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		527581		
			8.2. Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		92		
		9 Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	9.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		76537		
			9.2. Jumlah SDM kesehatannuntuk pelayanan kesehatan sesuai standar		156		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
					3377		
		10 Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		92		
			10.2. Jumlah SDM kesehatan nuntuk pelayanan kesehatan sesuai standar				
		11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		9437		
			11.2. Jumlah SDM kesehatan nuntuk pelayanan kesehatan sesuai standar		92		
		12 persentase ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	12.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		100		
			12.2. Jumlah SDM kesehatan nuntuk pelayanan kesehatan sesuai standar		32		
		13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	13.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		11199		
			13.2. Jumlah SDM kesehatan nuntuk pelayanan kesehatan sesuai standar		62		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTCOME	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
					46289		
		14. Persentase org dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	14.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 14.2. Jumlah SDM kesehatan nuntut pelayanan kesehatan sesuai standar		125		
3	Pekerjaan Umum	1. Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	1.1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten(ha) 1.2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (M) 1.3. Luas kawasa permukiman sepanjang pantai yang rawan abarasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha) 1.4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten(m) 1.5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten 1.6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten 1.7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	0 0 45312 4,968 ada/tidak 0 ada/tidak 489.54 meter	Dinas PU, Bina Marga KORPRI		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		3 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	3.1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik(m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100$	11716.59		
			3.2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100$	19471.32		
			3.3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100$	0		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		4 Persentase Jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yg terlindungi thd rumah tangga di seluruh kab.	4.1. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	ada/tidak	Ada	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
			4.2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten	ada/tidak	Tidak		
			4.3. Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggara SPAM		Tidak		
			4.4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		0		
			4.5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah lain		0		
		5 Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5.1. Jumlah rumah dengan akses unti pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		350		
			5.2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		1200		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			5.3. Jumlah rumah dengan akses untuk pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		1550		
			5.4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		0		
			5.5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		0		
			5.6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		1270		
			5.7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{rumah di wil. Pengembangan SPALD dengan kepaatan penduduk pada wilayah terbangun 25 jiwa/ha}} \times 100$	45.73%		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			5.8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepaatan penduduk pda wilaah terbangun <25 jiwa/ha}} \times 100$	45.57%		
			5.9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambunngan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD}} \times 100$	22.58%		
			5.10. Kinerja penediaan unit pengeolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yg memiliki akses unit pengolah-an setempat}}{\sum \text{rumah yg terma-suk dlm wil. Pengem-bangan SPALDS}} \times 100$	45.57%		
			5.11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{sarana pengang-kutan yang tersedia}}{\sum \text{sarana pengang-kutan yg dibutuhkan kabupaten}} \times 100$	0.00%		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			5.12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten}} \times 100$	0.00%		
			5.13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kabupaten}} \times 100$	75.49%		
			5.14. Kinerja Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dlm wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100$	0		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			6.1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\sum$ jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku $\sum$ jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)			
		6 Rasio Kepatuhan IMB	6.2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting		1		
			6.3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada/tidak	ada		
			6.4. Penetapan keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan / Gedung	ada/tidak	ada		
			6.5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan		13		
			6.6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten		0		
			6.7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten		1892		
			6.8. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat		57		
		7 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	7.1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten		1106.148	Dinas PU, Bina Marga dan SDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			7.2. Panjang jalan yang dibangun		0		
			7.3. Panjang jembatan yang dibangun		177.3		
			7.4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		6247		
			7.5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0		
			7.6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		6433		
			7.7. Panjang jembatan yang direhabilitasi		193.4		
			7.8. Panjang jalan yang dipelihara		58227		
			7.9. Panjang jembatan yang dipelihara		193.4		
		8 Rasio tenaga Operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	8.1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator /tkenis/analisis di wilayah kabupaten/kota		1		
			8.2. Jumlah tanga kerja operator/tkenis/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten		41		
			8.3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten		41		
			8.4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jaa Konstruksi /cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir		ada		
			8.5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten		ada		

NO	URUSAN DEMOKRASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			8.6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		ada		
			8.7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		ada		
			8.8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		ada		
			8.9. Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi kabupaten		ada		
			8.10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		ada		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022 ada	SUMBER DATA	KET.
			8.11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.		ada		
			8.12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten		ada		
			8.13. Tersedia data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		ada		
			8.14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0		
			8.15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha , bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0		
			8.16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		ada		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			8.17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0		
			8.18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten		0		
			8.19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten		0		
			8.20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten		0		
			8.21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		0		
			8.22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0		
			8.23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.		0		
			8.24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		5		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022 0	SUMBER DATA	KET.
			8.25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
4	Perumahan Rakyat	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	1.1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		59860	Dinas PKP, TR dan CK	
			1.2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam		14756		
			1.3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		26789		
			1.4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0		
			1.5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0		
			1.6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0		
			1.7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara		0		
			1.8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0		
			1.9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		0		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		2 Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	2.1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0		
			2.2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0		
			2.3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0		
			2.4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0		
			2.5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0		
			2.6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		0		
		3 Persentase ka- wasan permukim- an kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani	3.1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		15.04		
			3.2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		0		
			3.3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		4 Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	4.1. Jumlah rumah di kab/kota		59173		
			4.2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		1997		
			4.3. Jumlah rumah tidak layak huni		18652		
			4.4. Jumlah rumah yang tidak dihuni		0		
			4.5. Rasio rumah dan KK	jumlah KK jumlah total unit rumah	1.45		
			4.6. Jumlah rumah pembangunan baru		0		
			5.1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		438		
		5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	5.2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		0		
			5.3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		438		
			5.4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi		0		
			5.5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		0		
			5.6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		0		
			5.7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi		0		
			5.8. Jumlah pengembang yang teregistrasi		0		
			5.9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		0		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
5	Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan	1.1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		33	Satpolpp	
			1.2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		20		
			1.3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		6		
			1.4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		0		
			1.5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada/tidak	ada		
			1.6. Tersedianya sarana prasarana minimal		ada		
		2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yg disusun $\frac{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100$	0.00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			2.2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana $\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100$	266,651 x100 266,651 100.00%		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		3 Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100$	0.00%		
			3.2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100$	0.00%		
			3.3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100$	$\frac{164}{266,651} \times 100 \%$ 0.06%		
			3.4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$	$\frac{120}{266,651} \times 100 \%$ 0.05%		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHADIRAN/OUTDIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			3.5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops $\frac{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$	$0 \times 100 \%$ #DIV/0!		
			3.6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan $\frac{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$	$1080 \times 100 \%$ 266651 0.41%		
		4 jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB $\frac{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100$	$0 \times 100 \%$ 0 #DIV/0!		
			4.2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat $\frac{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100$	$3 \times 100 \%$ 3 100.00%		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			4.3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	44 x 100 %	100.00%	
				$\frac{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100$	44		
			4.4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	85482 x 100 %	100.00%	
				$\frac{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100$	85482		
		5 persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5.1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		Evakuasi 22 Hewan Berbahaya Evakuasi banjir Evakuasi pohon		
			5.2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada/tidak	0		
			5.3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada/tidak	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			5.4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa		0		dibuat dalam bentuk daftar
			5.5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		522		dibuat dalam bentuk daftar
			5.6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		0		
			5.7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		120		
			5.8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	1.1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		7		
			1.2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu EM dan OTM		0		
			1.3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		1		
			1.4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		0		
			1.5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		1		
			1.6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		0		
			1.7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		1		
			1.8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		0		
			1.9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		0		
			1.10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter		0		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		0		
			1.12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		0		
			1.13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		0		
			1.14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		23		
			1.15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat		0		
			1.16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan		0		
			1.17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dukungan kesehatan		0		
			1.18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		1		
			1.19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		1		

NO	URUSAN DEMOKRASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		0		
			1.21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		0		
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	2.1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		83357		
			2.2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		24		
			2.3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		0		
			2.4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok		0		
			2.5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	ada/tidak	0		
			2.6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		97		
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1.1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dgn peraturan yang berlaku	1	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan	
			1.2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi indikator - x target indikator 100% realisasi	$\frac{6}{6} \times 100$ 100.00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0		
		2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jmlah penerapan program PBK kualifikasi KKNl atau akupasi pada tahun 2021 $\frac{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2021}}{1} \times 100$	$\frac{1}{1} \times 100 = 100.00\%$		
			2.2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2021 $\frac{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2021}}{0} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$		
			2.3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2021 $\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2021}}{8} \times 100$	$\frac{3}{8} \times 100 = 37.50\%$		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.4. Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2021 $\times 100$ Jumlah seluruh LPK pada tahun 2021	$\frac{1}{4} \times 100$ 25.00%		
			2.5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2020 $\times 100$ Jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020	$\frac{4}{4} \times 100$ 100.00%		
			2.6. Jumlah penganggur yang dilatih		8		
			2.7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2022 $\times 100$ Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2022	$\frac{8}{8} \times 100$ 100.00%		
			2.8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2022 $\times 100$ Jumlah lulusan pada tahun 2022	$\frac{7}{8} \times 100$ 87.50%		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2021 $\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2021}}{\text{Jmlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2021}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			2.10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan peaihan	$\frac{\sum \text{CPMI dlatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			2.11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMWG) dan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		0		
		3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3.1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yg menerapkan pro-gram peningkatan produktivitas pd th 2021 $\frac{\text{Jumlah perusahaan yg menerapkan pro-gram peningkatan produktivitas pd th 2021}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun 2021}} \times 100$	$\frac{285}{315} \times 100$ 90.48%		
			3.2. Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja)			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		4 Persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	4.1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2021 $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}}{68} \times 100$	$\frac{37}{68} \times 100$ 54.41%		
			4.2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020 $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB}}{12} \times 100$	$\frac{11}{12} \times 100$ 91.67%		
			4.3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		11		
			4.4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yg sudah menyusun struktur dan skala upah $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP dan PKB)}}{56} \times 100$	$\frac{56}{56} \times 100$ 100.00%		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			4.5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan $\frac{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100$	$\frac{191}{315} \times 100$ 60.63%		
			4.6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan x yang berselisih 100% $\frac{\text{Jumlah perusahaan pada tahun 2021}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100$	$\frac{3}{315} \times 100$ 0.95%		
			4.7. Jumlah mogok kerja		0		
			4.8. Jumlah penutupan perusahaan		0		
			4.9. Jumlah perselisihan kepentingan		0		
			4.10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0		
			4.11. Jumlah perselisihan PHK		1		
			4.12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		153		
			4.13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		0		
			4.14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	ada/tidak	Ada		

NO	URUSAN DEKONTERESTANSI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			4.15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100$	$\frac{2}{3} \times 100 = 66.67\%$		
		5 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	5.1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		146		
			5.2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		347		
			5.3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		4		
			5.4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		0		
			5.5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		0		
			5.6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		0		
			5.7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		9		
			5.8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		0		
			5.9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPM} / \text{CTKI}}{\sum \text{CPM} / \text{CTKI}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			5.10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		0		
			5.11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			5.12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \text{PMI / TKI yang medaatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI /TKI}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			5.13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI / TKI purna dan kluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI /TKI purna dan keluarganya}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			5.14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentukn}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1.1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		0	Dinas Sosial,P2PA,P2KB	
			1.2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		0		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	2.1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE	1		
			2.2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		0		
			2.3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumah korban kekerasan anak yang dilayani Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten	$\frac{11}{11} \times 100$ 100.00%		
			2.4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		0		
			2.5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota		0		
		3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3.1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0		
			3.2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		0		
			3.3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		0		
			3.4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		0		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			3.5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah diadopsi		0		
			3.6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terakreditasi		0		
			3.7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban keke- rasan perempuan yg mendapatkan layanan Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan x 100	15 x100 15 100.00%		
9	Pangan	1 Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras /jagung sesuai kebutuhan)	1.1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ADA/TIDAK Infrastruktur pergudangan	Ada (6)	Dinas Pertanian dan Pangan	
			1.2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada (1)		
			1.3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak		
			1.4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada (7)		
			1.5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada		
			1.6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	tidak ada		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.	
			KELUARAN/OUTPUT					
			1.7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	tidak ada			
			1.8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	37			
10	Pertanahan	1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1.1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jmh surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) x 100	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!	Bagian Pertanahan dan BPN	sejak tahun 2018, izin lokasi diterbitkan OSS (pusat)
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	0			
			1.2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee x 100	$\frac{926}{2161} \times 100$	42.85%		
				Jumah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	2161			

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absntee Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landrefrm yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			1.4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik $\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
11	Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.1. Hasil perhitungan provinsi terhadap a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKD) c. Indeks Tutupan Lahan (ITH)	<i>Nilai relatif</i> = $\frac{C_i}{L_{i,i}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{i,i})^2_{rata-rata} + (C_i/L_{i,i})^2_{maksimum}}{2}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq PI_i \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_i \leq 5,0 \rightarrow$ cemara ringan $5,0 < PI_i \leq 10,0 \rightarrow$ cemara sedang $PI_i > 10,0 \rightarrow$ cemara berat $IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	58.89 89.87 89.18	Dinas Lingkungan Hidup	

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	2.1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	19		
		3 Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	3.1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	$\frac{9}{12} \times 100 = 75.00\%$		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			3.2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. $\times 100$	$\frac{5}{9} \times 100$ 55.56%		
			3.3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui Jumlah usulan MHA	$\frac{0}{5} \times 100$ 0.00%		
			3.4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan Jumlah MHA yang ada	$\frac{0}{9} \times 100$ 0.00%		
			3.5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat $\times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			3.6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{total jml pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100$	$\frac{2 \times 100}{2} = 100.00\%$		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	1.1. Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100$	$\frac{72,174 \times 100}{131,416} = 54.92\%$		
			1.2. Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100$	$\frac{730 \times 100}{3,181} = 22.95\%$		
			1.3. Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100$	$\frac{4,112 \times 100}{13,406} = 30.67\%$		
			1.4. Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dlm 1 th}}{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dlm 2 th}} \times 100$	$\frac{3 \times 100}{3} = 100.00\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1.1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		9		
			1.2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		0		
			1.3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		59		
			1.4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		93		

NO	URUSAN DEKONTAMINASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 TFR (angka kelahiran total)	1.1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Tidak		
			1.2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		29.3		
			1.3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)		69.9		
			1.4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE	Jumlah masyarakat yang terpapar isi advokasi dan KIE Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) pesan program KKBPK $\times 100$	51500 x100 63858 80.65%		
			1.5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/ pemangku organisasi kemasyarakatan yang berperan serta aktif dalam pengeolaan program KKBPK	5124		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		2 Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	2.1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP x 100 Jumlah faskes	90 x100 589 15.28%		
			2.2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif x 100 jumlah PUS	26,336 x100 39,584 66.53%		
			2.3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	39		
			2.4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern x 100 Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	1,093 x100 1,223 89.37%		
		3 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3.1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar desa/kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kabupaten. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	26 x100 282 9.22%		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022		SUMBER DATA	KET.
			3.2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI x 100 Jumlah Keluarga PBI	12,576 x100 26,336	47.75%		
15	Perhubungan	1 Rasio konektivitas Kabupaten	1.1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100	2 x100 2	100.00%	Dinas Perhubungan	
			1.2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun jumlah kendaraan wajib uji x 100	542 x100 1,542	35.15%		
			1.3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan x 100 jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten x 100	0 x100 0	#DIV/0!		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHIDUPAN/OUTDIIT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/kota x 100	$\frac{201}{379} \times 100$ 53.03%		
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1.1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yg menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100 Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			1.2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah PD yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo x 100 jumlah perangkat daerah	$\frac{1}{50} \times 100$ 2.00%		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	Tidak		surat keterangan
		2 persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2.1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan Instansi penyelenggara Negara domain dan sub domain sesuai dengan PM Kominfo No. /2015 Jumlah Kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	$\frac{0 \times 100}{0}$ #DIV/0!		surat keterangan

NO	URUSAN DEMOKRASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar x100	30 x100 60.00%		
				Jumlah perangkat Daerah	50		
			2.3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Jumlah PD yg mengimplementasi-kan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yg ditetapkan sesuai dgn ketentuan perundang-undangan x100	30 x100 60.00%		
				Jumlah perangkat daerah	50		
			2.4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan pulbik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik x 100	12 x100 75.00%		
				Jumlah layanan	16		

NO	URUSAN DEMOKRASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik x 100 Jumlah layanan	12.50% 2 x100 16		
			2.6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x 100 Jumlah sistem elektronik	62.50% 10 x100 16		
			2.7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah x 100 Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	20.00% 3 x100 15		

NO	URUSAN DEKEMINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah x 100 Jumlah perangkat daerah	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			2.9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat x 100 Jumlah perangkat daerah	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			2.10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah Perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya x 100 Jumlah perangkat daerah	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			2.11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai x 100 Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	$\frac{1}{27} \times 100$ 3.70%		

NO	URUSAN DEKEMINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city x 100 Jumlah perangkat daerah	 #DIV/0! 0 x100 0		
			2.13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo x 100 Jumlah ASN pengelola TIK	 44.44% 4 x100 9		
			2.14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/tidak	Ada		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KEHADAPAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		3 persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	3.1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	$\frac{\sum \text{komunitas masy. atau mitra strategis Pemerintah daerah kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\sum \text{komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten}} \times 100$	$\frac{3 \times 100}{21} = 14.29\%$		
			3.2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Kabupaten}} \times 100$	$\frac{1 \times 100}{33} = 3.03\%$		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			3.3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\sum \text{Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{5} \times 100$	20.00%		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 peningkatan koperasi yang berkualitas	1.1. Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan $\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum emmpunyai zin usaha simpan pinjam}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum emmpunyai zin usaha simpan pinjam}} \times 100$	#DIV/0!	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan sisin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan $\frac{\text{jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100$	0×100 #DIV/0! 0		
			1.3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi $\frac{\text{Jumlah kopersi yang ada}}{\text{Jumlah kopersi yang ada}} \times 100$	60×100 271 22.14%		
			1.4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha siman pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya $\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100$	15×100 271 5.54%		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan $\frac{\quad}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{12 \times 100}{271}$ 4.43%		
			1.6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian $\frac{\quad}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{35 \times 100}{89,989}$ 0.04%		
			1.7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan pelatihan $\frac{\quad}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{12 \times 100}{271}$ 4.43%		
			1.8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		0		
			1.9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) $\frac{\quad}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{33 \times 100}{271}$ 12.18%		tidak perlu diisi

NO	URUSAN DEKEMINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan $\frac{\text{Jumlah koperasi yang ada}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			1.11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran $\frac{\text{Jumlah koperasi yang ada}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{15}{271} \times 100$ 5.54%		
			1.12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha $\frac{\text{Jumlah koperasi yang ada}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			1.13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan $\frac{\text{Jumlah koperasi yang ada}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100$	$\frac{15}{271} \times 100$ 5.54%		
		2 meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru $\frac{\text{Jumlah wirausaha yang ada}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100$	$\frac{1,051}{9,676} \times 100$ 10.86%		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) x 100	1,189 x100 9,672 12.29%		
				Jumlah usaha mikro yang ada			
			2.3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra x 100	0 x100 0 #DIV/0!		
				Jumlah usaha mikro yang ada			
			2.4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi dan sertifikasi produk usaha standarisasi	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi x 100	0 x100 0 #DIV/0!		
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk			
			2.5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran x 100	63 x100 9,672 0.65%		
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran			

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			2.6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pealtihan x 100 Jumlah usaha mikro yang ada	0 x100 #DIV/0! 0		
			2.7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha x 100 Jumlah usaha mikro yang ada	0 x100 #DIV/0! 0		
			1.1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang mendjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang diberikan kepada investor	0		
			1.2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP Pelaksanaan Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		
18	Penanaman Modal	persentase peningkatan investasi di Kabupaten	1.3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal pertahun	0	Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu satu pintu	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/bussiness forum, one on one meeting	1		
			1.5. Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	0		
			1.6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
			1.7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	80		
			1.8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	3365		Jumlah OSS (UMK) 567
			1.9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten/kota	3114		
			1.10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur penanaman modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	0		
			1.11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	147		
			1.12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumah permintaan data dan informasi yg terpenuhi/jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	40		

NO	URUSAN DEKORATIF	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
19	Kepemudaan dan Olah raga	1 tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			1.2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		113		
		2 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2.1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepemimpinan pemuda		0		
			2.2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		0		
		3 peningkatan prestasi olahraga	3.1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		118		
			3.2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		10		
20	Statistik	1 persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1.1. Tersedianya buku profil daerah		Tidak	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	
			1.2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		1		
			1.3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		330		
			1.4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		0		
			1.5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		0		

NO	URUSAN DEMOKRASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral $\times 100$	$\frac{1}{2} \times 100$ 50.00%		
			1.7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah indikator statistik sektoral $\times 100$	$\frac{10}{10} \times 100$ 100.00%		
			1.1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan $\times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
			1.2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian $\times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
21	Persandian	1 tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	1.3. Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah $\times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$ #DIV/0!		
				Jumlah SE yang ada			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan $\frac{\text{Jumlah titik pada PHKS}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100$	$\frac{0 \times 100}{0} \quad \#DIV/0!$		
22	Kebudayaan	1 Terlestarikannya cagar budaya	1.1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris+diamankan+di-pelihara+diselamatkan+dipublikasikan)	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1.2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK yang (disebarluaskan+dikaji+dika-yakan keberagamannya)	13		
			1.3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	13		
			1.4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + jumlah sdm disertifikasi + jumlah lembaga petensi	13		
			1.5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	1		
			1.6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan+diamankan+diz onasi+dipelihara+dipugar)	1		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin keluar Kabupaten/Kota	0		
			1.8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	40		
			1.9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	13		
			1.10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola+diamankan+dikembangkan+dimanfaatkan)	0		
			1.11.1 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0		
			1.11.2. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0		
			1.12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0		Tidak perlu diisi
			1.13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	0		
			1.14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	0		
			1.15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0		

NO	URUSAN DEMEDINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm museum	0		
			1.17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0		
			1.18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0		
			1.19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0		
23	Perpustakaan	1 nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1.1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk di wilayahnya(dalam jiwa)	$\frac{18,861}{266,651} \times 100$ 7.07%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			1.2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite x 100 Jumlah penduduk di wilayahnya(dalam jiwa)	$\frac{6,292}{266,651} \times 100$ 2.36%		
			1.3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di wilayahnya Jumlah penduduk di wilayahnya(dalam jiwa)	$\frac{6}{266,651} \times 100$ 0.002%		

NO	URUSAN DEMOKRATISASI	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{6}{654} \times 100$	0.917%	
				Jumlah perpustakaan x 100 dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya			
			1.5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	6292		
		2 indeks pembangunan literasi masyarakat	2.1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		0		
			2.2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		0		
			2.3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item		0		
24	Kearsipan	1 tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas	1.1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip x 100 Jumlah seluruh arsip aktif	$\frac{222}{222} \times 100$	100.000%	

NO	URUSAN DEKEMINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (KELUARAN/OUTPUT)	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
			1.2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip x 100	251 x100 251 100.000%		
				Jumlah seluruh arsip inaktif			
			1.3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik x 100	447 x100 447 100.000%		
				Jumlah seluruh arsip statis			
			1.4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN x 100	0 x100 0 #DIV/0!		SURAT KET
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah kabupaten			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	KET.
		2 tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	2.1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		0		SURAT KET
			2.2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		0		
			2.3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten		1		
			2.4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK		0		SURATKET
			2.5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		0		SURAT KET
			2.6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		0		SURAT KET

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT) URUSAN PILIHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	IKK KELUARAN(OUTPUT)	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA 2022		SUMBER DATA	KET.
1	Perikanan	1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten	1.1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		10	Dinas Perikanan	
			1.2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang Operasional Jumlah Seluruh TPI yang ada di Kabupaten x 100	$\frac{6 \times 100}{6}$	100.00%		
			1.3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan		114		
			1.4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		68		
			1.5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi		1,219,140		

NO	URUSAN	IKK OUTCOME	IKK KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER	KET
2	Pariwisata	1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1.1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		24	Dinas Ke-pemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
			1.2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		8		
			1.3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten		71		
			1.4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		2519		tidak dirinci per kebangsaan
			1.5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		6		
			1.6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten		0		
			1.7. Jumlah industri pariwisata daerah yg berpartisipasi pd even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		425		
			1.8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah Tenaker Pariwisata}} \times 100$	$\frac{0}{24} \times 100$	0.00%		
			1.9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!		
			1.10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		0		

NO	URUSAN	IKK OUTCOME		IKK KELUARAN/OUTPUT		RUMUS/PERHITUNGAN		CAPAIAN KINERJA		SUMBER	KET
3	Pertanian	1	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	1.1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan			138	Dinas Pertanian dan Pangan	
				1.2	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan			1060		
				1.3	Jumlah Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah Penerbitan izin usaha pertanian			21		
				1.4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah Prasarana yang aktif digunakan	$\frac{1060}{1060} \times 100$	100.00%			
						Jumlah Prasarana yang dibangun	$\frac{1060}{1060}$				
				1.5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten	Jumlah usulan usaha pertanian yang difasilitasi	$\frac{1}{1} \times 100$	100.00%			
		Jumlah Usulan usaha pertanian	$\frac{1}{1}$								
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2.1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah Area yang dapat ditanggulangi	$\frac{35}{35} \times 100$	100.00%			
						Luas Area terkena bencana	$\frac{35}{35}$				

NO	URUSAN	IKK OUTCOME	IKK KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER	KET
6	Perdagangan	1 Persentase pelaku usaha yg memperoleh izin sesuai dgn ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1.1 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:	Jumlah Ijin Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
			a. Pusat perbelanjaan	$\frac{\text{Jumlah Permohonan Izin Pusat perbelanjaan yang sudah lengkap dan benar}}{\text{Jumlah Ijin Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan}} \times 100$				
			b. Toko swalayan	Jumlah Ijin Pusat Perbelanjaan yg diterbitkan ≤ 5 hari kerja	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!		
				$\frac{\text{Jumlah Permohonan Izin Pusat perbelanjaan yang sudah lengkap dan benar}}{\text{Jumlah Ijin Pusat Perbelanjaan yg diterbitkan}} \times 100$				
			1.2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah Penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!	PTSP	
				$\frac{\text{Jumlah Permohonan Penerbitan TDG}}{\text{Jumlah Penerbitan TDG}} \times 100$				
			1.3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah Penerbitan TDG	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!		
				$\frac{\text{Jumlah Gudang yang ada di Kabupaten}}{\text{Jumlah Penerbitan TDG}} \times 100$				
			1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah SPTW utk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yg terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!		
				$\frac{\text{Jumlah Permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}}{\text{Jumlah SPTW utk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100$				

NO	URUSAN	IKK OUTCOME	IKK KEGIATAN/OUTPUT	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER	KET
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah SPTW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar x 100 Jumlah Permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0 x100 0	#DIV/0!		
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah SPTW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar x 100 Jumlah Permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0 x100 0	#DIV/0!		

NO	URUSAN	IKK OUTCOME	IKK KEGIATAN/OUTPUT	RUMUS/DEBITINGAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER	KET
			1.5 IKK KEGIATAN/OUTPUT Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten x 100 jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	0 x100 0	#DIV/0!		
			1.6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24 jam) Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100	0 x100 0	#DIV/0!		
			1.7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a+ b) x 100 % K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)				
					1 x100 16	6.25%		
			1.8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok		0		

NO	URUSAN	IKK OUTCOME	IKK KINERJA	IKK KELUARAN/OUTPUT	RUMUS/DESKRIPSI	CAPAIAN KINERJA		SUMBER	KET	
		2	Persentase kinerja pupuk	2.1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	$\frac{196,070}{525,514} \times 100$	37.31%		
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	3.1	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100$	$\frac{394}{2,186} \times 100$	18.02%		
				3.2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!		
7	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah realisasi ijin yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan atau pengajuan ijin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!	Dinas Naker, Perindustrian dan Transmigrasi	

NO	URUSAN	IKK OUTCOME	IKK KELUARAN/OUTPUT	BUMUS/REPUTINGAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER	KET
		2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	2.1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		30%		
		3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3.1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi IUI Kecil dan IUI menengah yang diterbitkan jumlah permohonan atau pengajuan ijin yang masuk x 100	$\frac{114}{114} \times 100$	100.00%		
		4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	4.1 Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	jumlah realisasi izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan jumlah permohonan atau pengajuan ijin yang masuk x 100	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!		

NO	URUSAN	IKK OUTCOME	IKK KEGIATAN/OUTPUT	RUMUS/DEBITUNGAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER	KET
		5 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	5.1 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas x 100 total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	$\frac{0}{0} \times 100$	#DIV/0!		
8	Transmigrasi		1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya 2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3 Jumlah satuan pemukiman yang dibangun	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya Jumlah satuan pemukiman yang dibangun		20 20 4	Dinas Naker, Perindustrian dan Transmigrasi	

7820797450

7820829800 100.00%

